

LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS

**PROGRAM PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI PEMBENTUKAN SATGAS
ANTI NAPZA DI DESA SITUSARI KECAMATAN DARMA
KABUPATEN KUNINGAN**

**Oleh:
Gafrena Istyawanda
NRP.2204072**



**PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2025**

LAPORAN PRAKTIKUM KOMUNITAS TAHUN 2025

**PROGRAM PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NAPZA MELALUI PEMBENTUKAN SATGAS
ANTI NAPZA DI DESA SITUSARI KECAMATAN DARMA
KABUPATEN KUNINGAN**

Oleh:

Gafrena Istyawanda

NRP.2204072

Telah disetujui pada tanggal: 30 Desember 2025

Oleh:

Pembimbing Utama



Drs. Ramli, M.Pd.

Pembimbing Pendamping



Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial

Program Sarjana Terapan

Politeknik Kesejahteraan Sosial



Dr. Denti Kardeti, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-Nya praktikan dapat menyelesaikan laporan Praktikum Komunitas yang berjudul **“Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Pencegahan Penyalahgunaan Napza di Desa Situsari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan”**. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta tabi'in dan tabi'at hingga akhir zaman.

Praktikan menyadari bahwa terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari doa, usaha, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu Praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Suharma, S.Sos., M.P., Ph.D., selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Dr. Denti Kardeti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah memberikan arahan dan masukannya untuk kesuksesan Praktikum Komunitas.
3. Dr. Rahmat Syarif Hidayat, S.St., MPS.Sp., selaku Kepala Laboratorium Program Studi Pekerjaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang membantu dalam memberikan arahan kepada mahasiswa Praktikum Komunitas.
4. Drs. Ramli, M.Pd., selaku Koordinator Supervisor dan selaku Dosen Pembimbing Utama Praktikum Komunitas yang telah menyediakan waktu, tenaga, pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan praktikan dalam menyelesaikan laporan Praktikum Komunitas.
5. Dyah Asri Gita Pratiwi M.Kesos., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Praktikum Komunitas yang bersedia kebersamai dalam kegiatan Praktikum Komunitas hingga berjalan dengan sebagaimana mestinya.
6. Bapak Endin, selaku Kepala Desa Situsari yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan Praktikum Komnitas di Desa Situsari.
7. Edison, S.Pd., selaku Sekretaris Desa dan Supervisor Lapangan di Desa Situsari yang telah membimbing dan memberi arahan serta ilmunya yang memudahkan mahasiswa dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas.

8. Orangtua dan keluarga praktikan yang telah memberikan dukungan baik secara moril materil dan spiritual kepada praktikan selama pelaksanaan Praktikum Komunitas berlangsung hingga terselesaikannya laporan Praktikum Komunitas ini.

Akhir kata, praktikan berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa/i yang akan melaksanakan Praktikum Komunitas.

Bandung, 03 Desember 2025

Gafrena Istyawanda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR FOTO	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Praktikum Komunitas.....	1
1.2. Tujuan dan Manfaat Praktikum Komunitas	3
1.3. Sasaran	4
1.4. Sistematika Penulisan Laporan	5
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM KOMUNITAS	7
2.1 Metode Pekerjaan Sosial.....	7
2.3 Peranan Pekerja Sosial dalam <i>Community Work</i> dan <i>Group Work</i>	16
2.4 Tinjauan Konseptual yang Terkait dengan Kasus yang di Tangani	17
2.5 Regulasi yang Mendukung Praktikum Komunitas	23
BAB III KONTEKS PRAKTIKUM KOMUNITAS	26
3.1 Gambaran Umum Komunitas Lokasi Praktikum	26
3.2 Program/Layanan yang diberikan Komunitas (di bikin tabel).....	33
3.3 Profil Penerima Manfaat Program/Layanan Komunitas.....	34
BAB IV PENANGANAN KASUS	36
4.1 Tahap Membangun Relasi (<i>Dialog</i>).....	36
4.2 Tahap Asesmen (<i>Discovery</i>)	39
4.3 Tahap Rencana Intervensi (<i>Discovery</i>)	48
4.4 Tahap Intervensi (<i>Development</i>)	51
4.5 Tahap Evaluasi (<i>Development</i>)	54
4.6 Tahap Terminasi dan Rujukan (<i>Continuity</i>).....	55
BAB V PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM KOMUNITAS	58
5.1 Integrasi/Keterkaitan/ Saling Melengkapi Metode <i>Community Work</i> dan <i>Group Work</i> serta Capaian terbaik dari Praktikum Komunitas.....	58
5.2 Refleksi Praktikan	60
5.3 Keterlibatan Praktikan dalam Kegiatan di Desa Sitisari	62
5.4 Tantangan Praktikum Komunitas	67
BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI	68
6.1 Simpulan	68
6.2 Rekomendasi	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar.4. 1.Hasil <i>Social Mapping</i>	40
Gambar.4. 2.Hasil MPA	42
Gambar.4. 3.Hasil SLA	43
Gambar.4. 4.Janji Hati	44

DAFTAR FOTO

Foto 4. 1. <i>Transect Walk</i> dan <i>Social Mapping</i>	40
Foto 4. 2 Assesmen Lanjutan Pada Perangkat Desa	45
Foto 4. 3. Assesmen pada Keluarga Korban Penyalahgunaan NAPZA	46
Foto 4. 4. Assesmen pada Kader PKK.....	47
Foto 4. 5. Rencana Intervensi dengan Teknik TOP.....	49
Foto 4. 6. Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA	51
Foto 4. 7. Pembentukan Satgas Anti NAPZA.....	52
Foto 4. 8. Kerjasama dengan Polsek Darma.....	53
Foto 4. 9. Kerjasama dengan BNN Kabupaten Kuningan	54
Foto 4. 10. Penyerahan SK dan Terminasi	56
Foto 5. 1. Senam di Kecamatan Darma	63
Foto 5. 2. Wakaf Al-Qur'an	64
Foto 5. 3. Senam di Balai Desa	64
Foto 5. 4. Membantu Data Kader PKK.....	65
Foto 5. 5. Program Keluarga Berencana.....	66
Foto 5. 6. Pelantikan Perangkat Desa.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.Rencana Belajar Praktikum Komunitas	73
Lampiran 2.Daftar Hadir minggu ke-1	76
Lampiran 3.Daftar Hadir Minggu ke-2	77
Lampiran 4.Daftar Hadir Minggu ke-3	78
Lampiran 5.Daftar Hadir Minggu ke-4	79
Lampiran 6.Daftar Hadir Minggu ke-5	80
Lampiran 7.Daftar Hadir Minggu ke-6	81
Lampiran 8.Daftar Hadir Minggu ke-7	82
Lampiran 9.Berita Acara Lokakarya 1	83
Lampiran 10.Berita Acara Lokakarya 2	84
Lampiran 11.Surat Keputusan Satgas Anti Napza	85
Lampiran 12.Form Evaluasi Hasil	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktikum Komunitas

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung menyelenggarakan Praktikum Komunitas sebagai bagian dari kontinum praktikum di Poltekesos, diawali dengan Praktikum Laboratorium, Praktikum Institusi dan diakhiri dengan Praktikum Komunitas. Praktikum Komunitas bertujuan untuk melaksanakan intervensi pekerjaan sosial berbasis komunitas pada aras makro yang mencakup masyarakat, organisasi, dan kebijakan. Praktikum Komunitas berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Praktikum Komunitas merupakan proses pembelajaran melalui penguasaan dan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan nilai serta mengimplementasikan tahapan pertolongan pekerjaan sosial pada aras makro.

Tahapan pekerjaan sosial pada aras makro yaitu tahap membangun relasi (*dialogue*), tahap asesmen dan rencana intervensi (*discovery*), tahap pelaksanaan intervensi dan evaluasi (*development*), serta tahap terminasi rujukan (*continuity*). Praktikum Komunitas dilaksanakan selama 45 hari, terhitung dari 27 Oktober 2025 hingga 11 Desember 2025. Selama pelaksanaan praktikum komunitas, praktikan diharapkan mampu mencapai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial berbasis komunitas (*community work*), khususnya melalui proses pemberdayaan masyarakat yang menekankan partisipasi aktif, penguatan kapasitas, serta pembangunan kemandirian. Kegiatan Praktikum Komunitas berpusat di kabupaten kuningan, salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki beragam potensi lokal, sumber daya alam maupun sosial, serta dinamika masyarakat yang kompleks. Kondisi tersebut menjadikan kabupaten kuningan sebagai lingkungan belajar yang strategis bagi praktikan untuk mengaplikasikan konsep, pendekatan, dan metode pekerjaan sosial di masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan praktikum komunitas di kabupaten kuningan, kabupaten kuningan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki dinamika sosial cukup kompleks seiring dengan perkembangan pembangunan daerah. Berdasarkan Data Kabupaten Kuningan Dalam Angka 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa isu sosial muncul sebagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, seperti pengangguran,

kemiskinan, kesehatan, perlindungan anak, serta permasalahan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). Tingkat kemiskinan Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 tercatat sebesar 13,16%, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang berada pada angka 7,62%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang memadai.

BPS Kuningan juga mencatat bahwa angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 mencapai 6,24%, yang berdampak pada meningkatnya kerentanan terhadap masalah sosial lainnya, termasuk kenakalan remaja, peningkatan kriminalitas kecil, dan ketidakstabilan kesejahteraan keluarga. Di bidang kesehatan masyarakat, Profil Kesehatan Kabupaten Kuningan 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan juga menunjukkan masih ditemukannya kasus stunting, tingginya penyakit menular seperti TBC, serta keterbatasan layanan kesehatan mental.

Salah satu isu sosial yang mendapatkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan NAPZA. Berdasarkan data BNN Kabupaten Kuningan (BNNK) dalam laporan tahunan 2023, tercatat adanya peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja dan dewasa muda di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Darma, Jalaksana, dan Kuningan. BNNK Kuningan melaporkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 120 kasus temuan penyalahgunaan NAPZA, baik pengguna aktif maupun korban yang memerlukan layanan rehabilitasi. Angka ini menunjukkan adanya tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian karena Kuningan berada pada jalur perlintasan strategis yang menghubungkan Cirebon, Majalengka, dan Bandung, sehingga rawan menjadi wilayah transit peredaran gelap narkotika.

Berbagai permasalahan sosial tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kuningan masih membutuhkan penguatan program pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan dasar, serta sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menangani isu-isu sosial yang ada. Upaya penanganan secara terpadu dan partisipatif menjadi penting untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sejahtera, dan bebas dari permasalahan sosial, termasuk penyalahgunaan NAPZA.

1.2. Tujuan dan Manfaat Praktikum Komunitas

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari Praktikum Komunitas terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Tujuan Praktikum Komunitas adalah Praktikan mampu menguasai dan menerapkan kompetensi pekerjaan sosial generalis aras makro pada semua tahapan pertolongan pekerjaan sosial mulai dari tahap membangun relasi (*dialog*), assesmen dan penyusunan rencana intervensi (*discovery*), intervensi dan evaluasi (*development*), sampai dengan terminasi dan rujukan (*continuity*).

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus praktikum komunitas praktikan mampu:

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip dasar, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam seluruh pelaksanaan praktikum.
- 2) Memahami dan menerapkan tahapan pertolongan pekerjaan sosial generalis.
- 3) Mengidentifikasi dan memahami beberapa teori yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial pada aras makro serta regulasi yang relevan.
- 4) Memahami konteks praktikum dan sasaran praktikum di komunitas.
- 5) Mempraktikkan nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial pada aras makro, khususnya pada tahap membangun relasi (*dialog*), asesmen dan penyusunan rencana intervensi (*discovery*), intervensi dan evaluasi (*development*), sampai dengan terminasi dan rujukan (*continuity*) melalui penanganan masalah dan pengembangan potensi dan sumber komunitas.

1.2.2 Manfaat

Manfaat praktikum komunitas bagi Praktikan adalah memperoleh pembelajaran dalam hal:

1. Diterapkannya prinsip-prinsip dasar, nilai dan etika pekerjaan sosial dalam seluruh pelaksanaan praktikum.
2. Dipahami dan diterapkannya tahapan pertolongan pekerjaan sosial generalis.
3. Teridentifikasi dan dipahaminya beberapa teori yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial pada aras makro serta regulasi yang relevan.
4. Dipahaminya konteks praktikum dan sasaran praktikum di komunitas.
5. Diterapkannya nilai, pengetahuan dan keterampilan pekerjaan sosial pada aras makro, khususnya pada tahap membangun relasi (*dialog*), asesmen dan

penyusunan rencana intervensi (*discovery*), intervensi dan evaluasi (*development*), sampai dengan terminasi dan rujukan (*continuity*).

6. terselesaikannya penanganan masalah atau pengembangan potensi/sumber komunitas di lokasi praktikum, melalui kegiatan penyuluhan sosial dan/atau pemberdayaan masyarakat.

Manfaat praktikum bagi komunitas sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan sangatlah signifikan. Komunitas memperoleh dukungan serta pendampingan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Selain itu, komunitas juga terbantu dalam mengembangkan berbagai potensi dan sumber daya lokal melalui pendekatan pemberdayaan. Berbagai kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan selama praktikum turut meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kapasitas masyarakat dalam menangani isu-isu sosial di lingkungan mereka. Tidak hanya itu, komunitas juga mendapatkan kesempatan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan praktik baik (*best practices*) yang dilakukan bersama mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial (Polteksos) Bandung, sehingga dapat menjadi model bagi pengembangan program sosial di masa mendatang.

Sementara itu, bagi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, kegiatan Praktikum Komunitas menjadi wahana strategis untuk mengimplementasikan dan menguji efektivitas kompetensi akademik yang telah diberikan kepada mahasiswa selama perkuliahan. Praktikum ini memberikan kesempatan nyata bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam program-program pemberdayaan, asesmen sosial, intervensi komunitas, dan pengembangan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi dosen pembimbing untuk melaksanakan fungsi supervisi pekerjaan sosial secara langsung di lapangan, sekaligus memperkuat hubungan kerja sama antara institusi pendidikan dengan komunitas sebagai mitra dalam penyelenggaraan pendidikan vokasional berbasis praktik.

1.3. Sasaran

Adapun sasaran kegiatan praktikum komunitas yang dilaksanakan oleh praktikan meliputi masyarakat, organisasi, serta para pemangku kebijakan di wilayah Desa Situsari. Sasaran tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu *target group*, *support group*, dan *interest group*. Mengacu pada arahan dosen pembimbing (*supervisor*), serta mempertimbangkan bahwa praktikan berasal dari Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung yang merupakan

Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Sosial RI, maka sasaran masyarakat (*target group*) dalam pelaksanaan praktikum komunitas di Desa Sitisari difokuskan pada kelompok yang termasuk ke dalam kategori 12 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (12-PAS) sesuai dengan Permensos No.12 Tahun 2025. Kelompok ini diprioritaskan karena merupakan masyarakat yang membutuhkan perhatian, dukungan, dan intervensi sosial sesuai mandat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga kegiatan praktikum dapat memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran masyarakat Desa Sitisari. Maka dari itu, praktikan mengambil sasaran dari kegiatan praktikum komunitas ini khususnya dalam pelaksanaan intervensi, sebagai berikut:

1. *Target group* atau kelompok sasaran dari Satuan Tugas Anti NAPZA ialah kelompok masyarakat paling rentan terhadap paparan narkoba atau paling berpotensi untuk terjerumus dalam upaya pencegahan. Contohnya anak, remaja, lembaga pendidikan, tempat wisata, dan masyarakat di daerah kumuh atau tingkat pendidikan rendah.
2. *Support group* atau kelompok dukungan, yaitu merupakan kelompok individu serta organisasi yang memberikan kepada Satuan Tugas Anti NAPZA. Contohnya seperti Organisasi Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT), Pemerintah Daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), dll.
3. *Interest group* atau kelompok dukungan, merupakan yang memiliki kepentingan khusus terkait dengan masalah narkoba dan mendukung upaya pencegahan. Contohnya seperti mulai dari orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, Karang Taruna, dll.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat, Sasaran dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM, memuat tentang Gambaran Metode Pekerjaan Sosial, Tahapan dan Proses Pekerjaan Sosial (*Dialog, Discovery, Development dan Continuity*), Peranan Pekerja Sosial dalam *Community Work* dan *Group Work*, Tinjauan Konseptual serta Regulasi yang Mendukung Penanganan Kasus.

BAB III KONTEKS PRAKTIKUM KOMUNITAS, memuat tentang Bab ini membahas tentang gambaran umum komunitas lokasi praktikum

program dan layanan yang diberikan komunitas, dan profil penerima manfaat program/layanan komunitas.

BAB IV PENANGANAN KASUS, Bab ini membahas tentang pelaksanaan intervensi komunitas dari tahap membangun relasi (*dialog*), asesmen dan rencana intervensi (*discovery*), intervensi dan evaluasi (*development*), sampai dengan tahap terminasi dan rujukan (*continuity*).

BAB V PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM KOMUNITAS, memuat tentang gambaran integrasi/keterkaitan/saling melengkapi metode *community work* dan *group work* serta capaian terbaik dari praktikum komunitas, refleksi praktikan, keterlibatan (peran) praktikan dalam kegiatan lainnya di lokasi praktikum komunitas, dan tantangan praktikum komunitas.

BAB VI SIMPULAN DAN REKOMENDASI, memuat tentang Simpulan yang berisikan temuan penting selama pelaksanaan Praktikum Komunitas dan Rekomendasi untuk pengembangan Pemberdayaan di lingkungan Masyarakat.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL PRAKTIKUM KOMUNITAS

2.1 Metode Pekerjaan Sosial

Metode Pekerjaan Sosial terbagi menjadi dua, yaitu Metode Pekerjaan Sosial dengan Komunitas (*Community Work*) dan Metode Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group Work*). Berikut adalah pengertian, tujuan, teknik-teknik, serta keterampilan mengenai kedua metode tersebut. Berikut adalah pengertian, tujuan, model pendekatan, teknik serta pengetahuan dan keterampilan dalam Pekerjaan Sosial berbasis Komunitas (*Community Work*).

2.1.1 Pekerjaan Sosial dengan Komunitas (*Community Work*)

Berikut adalah pengertian, tujuan, model pendekatan, teknik serta pengetahuan dan keterampilan dalam Pekerjaan Sosial berbasis Komunitas (*Community Work*).

1. Tujuan

Pratik pekerjaan sosial dalam pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) merupakan kegiatan praktik Pekerjaan Sosial berbasis Komunitas. Menurut Lorraine M. Gutiérrez and Larry M. Gant (2016) menyatakan bahwa tujuan praktik pekerjaan Sosial berbasis Komunitas adalah untuk mengembangkan potensi dan sumber yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas guna menangani permasalahan sosial yang dihadapinya.

Praktik pekerjaan sosial berbasis komunitas bertujuan sebagai pengembangan, pencegahan atau penanganan permasalahan sosial yang memfokuskan pada pendekatan ekologi dalam upaya untuk:

- 1) Meningkatkan kesadaran dan berkembangnya inisiatif masyarakat untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di lingkungannya.
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan serta mengembangkan dan mendayagunakan potensi dan sumber yang ada.
- 3) Memperoleh masukan tentang peluang-peluang pemanfaatan sistem sumber penyedia pelayanan yang dapat diakses untuk menangani permasalahan sosial dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- 4) Memperoleh masukan tentang peluang-peluang pengembangan kebijakan di tingkat lokal.

2. Model Pendekatan

Praktikum komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat level desa dilakukan dengan menggunakan metode pekerjaan sosial, yaitu metode Pekerjaan Sosial Masyarakat atau Komunitas (*Community Work*). Praktik Pekerjaan Sosial dalam metode ini diterapkan dengan beberapa model pendekatan, yaitu sebagai berikut.

1) Model *Locality Development (Community Development)*

Model ini memandang bahwa perubahan atau pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan sangat baik melalui suatu partisipasi aktif dari masyarakat lokal.

2) Model *Social Planning (Community Services)*

Model ini terutama menekankan pada suatu proses teknik dalam memecahkan masalah. Model ini meyakini bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat berhubungan dengan masalah lingkungan yang kompleks.

3) Model *Social Action (Community Action)*

Model ini memiliki pandangan bahwa di dalam masyarakat yang bersangkutan, terdapat suatu bagian/kelompok yang kurang beruntung (yang sering kali tertindas) yang perlu dibantu dan diorganisasikan dalam rangka menekan struktur kekuasaan yang menindasnya.

(Sumber: Pedoman Praktikum Komunitas Tahun 2025)

3. Strategi dan Taktik

Strategi dan taktik-taktik praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas (*Community Work*) antara lain sebagai berikut:

1) Kolaborasi (*Collaboration*)

Strategi kolaborasi adalah strategi yang dilakukan ketika sistem sasaran sudah setuju (atau diyakinkan untuk setuju) dengan sistem kegiatan, bahwa perubahan dibutuhkan dan didukung pengalokasian sumber. Taktik yang digunakan dalam strategi kolaborasi yaitu implemtasi dan *capacity building* melalui partisipasi dan *empowerment* (pemberdayaan).

2) Kampanye (*Campaign*)

Strategi ini diterapkan ketika sistem sasaran bersedia berkomunikasi

dengan sistem kegiatan tetapi belum sepenuhnya setuju dengan perlunya perubahan. Mereka mungkin mendukung perubahan, tetapi tidak bersedia mengalokasikan sumber daya untuk mendukungnya. Taktik yang digunakan yaitu melalui taktik pendidikan untuk memberikan informasi dan membangun pemahaman kepada sistem sasaran mengenai pentingnya perubahan, sehingga mereka tergerak untuk mendukung perubahan. Kemudian taktik persuasi melalui *cooptation* (bergabung) dan *lobbying* (melobi), serta meminta bantuan media massa (*mass media appeal*).

3) Kontes (*Contest*)

Strategi ini diterapkan ketika sistem sasaran secara aktif menentang perubahan yang diinginkan dan/atau menolak mengalokasikan sumber daya. Bahkan, mereka tidak bersedia membuka komunikasi untuk membahas alasan resistensinya. Taktiknya yaitu *Bargaining* dan *Negotiation* (Tawar-Menawar dan Perundingan yaitu melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara pihak yang mendukung perubahan dan pihak yang menentang).

4. Teknik

Teknik yang digunakan Praktikan dalam melaksanakan praktikum komunitas di Desa Situsari, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, yaitu:

1) *Community Involvement*

Community Involvement (CI) adalah proses meleburkan diri ke dalam masyarakat dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat untuk membangun kepercayaan (*trust building*) bersama pemerintah desa, masyarakat dan *stakeholders* lainnya. *Community Involvement* bertujuan agar setiap kegiatan dalam proses praktikum mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa, masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Menurut Hardwood (2011), *community involvement* aktif merupakan wujud partisipasi individu atau kelompok berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan

2) *Home Visit*

Home visit adalah aktivitas melalui kunjungan ke rumah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat maupun masyarakat

di desa. Menurut Supardi (2006), tujuan melakukan *home visit* yaitu memperoleh informasi agar lebih memahami kondisi dan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang intervensi yang tepat dari aspek lingkungan, fisik, sosial, dan emosional.

3) *Methodology Participatory Assessment*

Teknik *Methodology of Participatory Assessment (MPA)* merupakan pendekatan yang dilakukan secara partisipatif untuk menggali masalah, kebutuhan dan kekuatan masyarakat. MPA bertujuan untuk menentukan permasalahan, prioritas masalah, dan potensi yang digunakan untuk menangani permasalahan tersebut. Menurut *World Bank* (1996), partisipasi aktif masyarakat dibutuhkan dalam pengambil keputusan dalam keberlangsungan kegiatan yang berdampak kehidupan mereka. Masyarakat perlu menyadari akan keberadaan masalah dan sadar akan kebutuhan penyelesaiannya

5. Pengetahuan dan Keterampilan dalam *Community Work*

Pengetahuan dalam *community work* yang diterapkan oleh Praktikan dalam kegiatan Praktikum Komunitas yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang keterampilan dasar, menengah dan mahir dalam praktik pekerjaan sosial baik pada aras makro maupun mezzo.
- 2) Pengetahuan tentang tahap pertolongan pekerjaan sosial pada aras makro (*dialogue, discovery dan development*).
- 3) Pengetahuan tentang komunitas (profil dan keberfungsian masyarakat, organisasi dan kebijakan terutama kebijakan pemerintahan desa dan pemerintahan daerah) di lokasi praktikum.
- 4) Pengetahuan tentang tipe kelompok, komunikasi dengan kelompok, Praktik Pekerjaan Sosial dengan Kelompok.
Pengetahuan tentang sasaran intervensi pekerjaan sosial komunitas (masyarakat, organisasi dan kebijakan).
- 5) Pengetahuan untuk menerapkan keterampilan dan teknologi (teknik) dalam setiap tahapan proses penanganan masalah maupun peningkatan potensi dan sumber komunitas, serta menerapkan keterampilan dalam pemberdayaan dan penyuluhan sosial.
- 6) Aplikasi praktis dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai untuk meningkatkan keberfungsian organisasi, masyarakat dan kebijakan.

- 7) Pengetahuan tentang Pemberdayaan, Penyuluhan Sosial serta Pengembangan Masyarakat

Keterampilan *community work* yang diterapkan oleh Praktikan dalam kegiatan Praktikum Komunitas yaitu:

- 1) Keterampilan membangun komunikasi dan relasi dengan kelompok
- 2) Keterampilan menggunakan *tools*, yaitu asesmen kebutuhan kelompok, asesmen menentukan tipe kelompok, asesmen perubahan perilaku anggota kelompok, asesmen proses kelompok, dan asesmen kekompakan kelompok.
- 3) Keterampilan menetapkan tipe kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan klien dan memilih teknik-teknik kelompok sesuai tipe kelompok.
- 4) Keterampilan Berpikir kritis dalam perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi dan berkolaborasi bersama masyarakat

2.1.2 Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (*Group Work*)

Berikut adalah tinjauan konseptual mengenai Pekerjaan Sosial dengan kelompok (*group work*) yang mencakup pengertian, tujuan dan tipe-tipe kelompok dalam *group work*. *Association of Social Work* mengartikan *Social Group Work* sebagai suatu pelayanan kepada kelompok dimana tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka (*social adjustment*). Sedangkan *Group work* menurut Zastrow (2017) menyatakan bahwa *group work* adalah proses membantu individu dengan menggunakan kelompok sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi, sosial, atau pengembangan komunitas. Intervensi ini dilakukan dalam kerangka kolaborasi dan saling mendukung.

1. Tujuan

Tujuan *group work* dalam konteks pekerjaan sosial adalah untuk mendukung individu atau kelompok mencapai perubahan positif melalui partisipasi dalam aktivitas kelompok. Dasarnya, *group work* dapat mencapai perubahan positif dalam kehidupan anggota kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Tipe-tipe kelompok

Berikut terdapat 9 tipe kelompok yang dapat digunakan dalam melakukan praktik pertolongan dengan metode *group work*:

- 1) *Social Conversation Group* (kelompok percakapan sosial)

Bertujuan untuk menguji dan menentukan seberapa dalam hubungan dapat dikembangkan diantara orang yang belum saling mengenal dengan baik.

2) *Recreation Group* (kelompok rekreasi)

Kelompok memberikan kegiatan untuk kesenangan, bersifat spontan, tidak perlu ada pemimpin, peralatan tidak banyak.

3) *Recreation Skill Group* (kelompok keahlian rekreasi)

Meningkatkan beberapa keterampilan dan dalam waktu yang bersamaan memberikan kesenangan. Kelompok memerlukan penasehat, pelatih, instruktur dan lebih berorientasi pada aturan permainan.

4) *Educational Group* (kelompok pendidikan)

Memperoleh pengetahuan dan mempelajari keterampilan yang lebih kompleks. Pemimpinnya biasanya seorang yang profesional yang benar benar terlatih dan ahli dalam bidang tertentu.

5) *Problem Solving and Decision Making Group* (kelompok masalah dan pengambilan keputusan).

Pihak pemberi dan penerima pelayanan sosial dapat secara bersama-sama terlibat dalam kegiatan. Pemberi pelayanan menggunakan pertemuan kelompok untuk mencapai tujuan suatu rencana pengembangan bagi kelayan atau sekelompok kelayan. Kelompok harus memutuskan: Bagaimana mengalokasikan sumber dana yang terbaik, bagaimana memperbaiki pelaksanaan pelayanan bagi kelayan merubah keputusan kebijakan dari lembaga, bagaimana memperbaiki koordinasi dengan lembaga lain.

6) *Self Help Group* (kelompok bantu diri)

Kelompok kecil yang disusun saling membantu dan untuk mencapai suatu tujuan serta bersifat sukarela. Kelompok ini menekankan pada interaksi sosial secara tatap muka dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi antar anggota.

7) *Socialization Group* (kelompok sosialisasi)

Tujuannya untuk mengembangkan atau mengubah sikap dan perilaku anggota kelompok agar dapat diterima secara sosial. Mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri dan merencanakan masa depan. Peranan pemimpin sangat diperlukan.

8) *Therapeutic Group* (kelompok penyembuhan)

Terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah emosional yang agak berat. Pemimpinnya memerlukan keterampilan dalam persepsi, pengetahuan

tentang manusia, dinamika kelompok. Contoh: gangguan kepribadian, gangguan jiwa, trauma, dan lain-lain.

9) *Sensitivity Group* (kelompok melatih kepekaan)

Melakukan percakapan yang mendalam dengan sepenuh hati tentang mengapa mereka berperilaku seperti itu. Tujuannya memperbaiki masalah kesadaran antar pribadi.

Pelaksanaan praktikum komunitas, praktikan telah menggunakan tipe kelompok *educational group* yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan. Praktikan melaksanakan kegiatan pemberdayaan bersama kelompok sasaran dan *interest group* yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas melalui kegiatan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

3. Teknik dan keterampilan dalam *Group Work*

Berikut merupakan teknik *Social Social Group Work* menurut Zastrow (2017) yang dapat digunakan dalam *Group Work*:

1) *Ice Breaking*

Digunakan pada awal pertemuan untuk membantu anggota kelompok saling mengenal, mencairkan suasana, dan membangun hubungan awal yang positif. Contohnya adalah permainan atau diskusi ringan untuk mengenalkan anggota satu sama lain.

2) *Role Playing*

Anggota kelompok diberikan peran tertentu dalam skenario simulasi untuk membantu memahami perspektif orang lain, mengembangkan keterampilan interpersonal, atau memecahkan masalah sosial. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah.

3) *Group Discussion*

Diskusi kelompok diarahkan oleh pekerja sosial dengan tujuan untuk mengeksplorasi ide, pandangan, dan pengalaman anggota kelompok terkait topik tertentu. Pekerja sosial bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan semua anggota dapat berpartisipasi dan diskusi tetap fokus.

4) *Problem Solving*

Pekerja sosial memfasilitasi proses identifikasi masalah, analisis penyebab, dan pencarian solusi dalam kelompok. Teknik ini membantu anggota kelompok mengembangkan keterampilan untuk mengatasi tantangan pribadi dan kelompok

dengan cara yang kolaboratif.

5) *Feedback*

Pekerja sosial memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota kelompok, serta mendorong mereka untuk saling memberikan feedback yang mendukung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri dan kemampuan sosial anggota kelompok.

Keterampilan yang dapat digunakan dalam *Group Work* adalah Keterampilan membangun komunikasi dan relasi dengan kelompok (Kontak awal, membangun kontrak); Keterampilan menggunakan *tools*: asesmen kebutuhan kelompok, asesmen menentukan tipe kelompok, asesmen perubahan perilaku anggota kelompok, asesmen proses kelompok, asesmen kekompakan kelompok, asesmen *leadership function analysis*, asesmen *team climate questionnaire*, asesmen *people skill inventory*. Keterampilan menetapkan tipe kelompok sesuai kebutuhan kelompok dan memilih teknik-teknik kelompok.

2.2 Tahapan dalam Proses Pekerjaan Sosial

1. Membangun Relasi (*Dialog*)

Membangun relasi merupakan tahap awal dalam pekerjaan sosial dalam membangun hubungan positif dengan klien. Hubungan yang baik sangat penting untuk menciptakan kepercayaan dan kenyamanan, sehingga klien merasa terbuka untuk berbagi masalahnya. Menurut Zastrow (2019) menyatakan bahwa Membangun relasi adalah langkah penting karena keberhasilan intervensi sangat bergantung pada hubungan kerja antara pekerja sosial dan klien. Dalam proses ini, pekerja sosial menunjukkan empati, kesabaran, dan keterampilan komunikasi untuk membangun koneksi emosional dengan klien.

2. Asesmen (*Discovery*)

Asesmen adalah pengumpulan dan analisis informasi untuk memahami permasalahan, kebutuhan, dan potensi komunitas. Pekerja sosial menggunakan berbagai metode, seperti wawancara, observasi, dan pemetaan sosial, untuk mengidentifikasi akar masalah. Asesmen memungkinkan komunitas untuk turut menyampaikan perspektif mereka, sehingga solusi yang dirancang lebih relevan.

3. Rencana Intervensi (*Discovery*)

Rencana intervensi adalah kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur yang digunakan dalam proses pekerjaan sosial untuk membantu klien mencapai tujuan tertentu. Rencana ini disusun berdasarkan hasil asesmen dan melibatkan

kolaborasi antara pekerja sosial dan klien. Menurut Sheafor dan Horejsi (2008) menyatakan bahwa rencana intervensi adalah suatu alat perencanaan yang digunakan untuk mengorganisasikan kegiatan/tindakan tertentu bertujuan untuk membantu klien mengatasi permasalahan atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses rencana intervensi yaitu membentuk tim (*team building*), merencanakan dan menentukan intervensi (*Framing Solutions*) dan menguatkan motivasi kerja sama (*strengthening energi to work together*).

4. Intervensi (*Development*)

Tahap intervensi adalah pelaksanaan rencana yang telah disusun, melibatkan aktivitas-aktivitas konkret untuk mencapai tujuan. Intervensi dapat berupa pelatihan, kampanye sosial, pengorganisasian komunitas, atau pembangunan fasilitas. Pekerja sosial bertindak sebagai fasilitator yang mendukung komunitas untuk mengambil peran aktif dalam implementasi program. Netting et al. (2017) menambahkan bahwa pekerja sosial di aras makro sering bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau advokat dalam mengimplementasikan intervensi yang melibatkan banyak pihak. Kegiatan dalam tahap ini meliputi:

- 1) Mengaktifkan dan menguatkan interaksi sosial (*activating social interaction*) antar kelompok atau kesatuan-kesatuan sosial
- 2) Mengaktifkan dan menggerakkan sumber daya (*activating resource system*)
- 3) Memperluas peluang (*expanding opportunities*)
- 4) Pemahaman akan keberhasilan yang telah dicapai (*recognizing success*)
- 5) Pendampingan untuk kesinambungan (*facilitating for sustainability*)
- 6) Pengembangan sistem informasi (*developing information systems*)

5. Evaluasi (*Development*)

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan dampak intervensi yang telah dilakukan. Proses ini melibatkan pengumpulan data mengenai perubahan yang terjadi di komunitas, baik dari segi hasil (*output*) maupun dampak jangka panjang (*outcome*). Evaluasi memungkinkan pekerja sosial dan komunitas untuk memahami keberhasilan serta memperbaiki strategi bila diperlukan.

6. Terminasi dan Rujukan (*Continuity*)

Tahap akhir ini melibatkan pengakhiran hubungan formal antara pekerja sosial dan komunitas, dengan memastikan bahwa komunitas dapat melanjutkan

program secara mandiri. Dalam beberapa kasus, pekerja sosial juga memberikan rujukan kepada pihak lain, seperti lembaga pemerintah atau organisasi *non-profit*, untuk mendukung keberlanjutan program. Terminasi dilakukan dengan komunikasi yang baik agar komunitas merasa didukung sepenuhnya. Terminasi mengacu pada akhir dari hubungan profesional antara pekerja sosial dan klien (Ashman, 2015). Proses pemutusan hubungan ini memerlukan keterampilan dan teknik khusus, terlepas dari tingkat intervensi yang dilakukan. Penting untuk mempertimbangkan waktu yang tepat untuk pelaksanaan terminasi. Hellenbrand dalam (Hawari, 2006) mengidentifikasi tiga jenis terminasi dasar yaitu:

- 1) Intervensi yang dapat diprediksi, yaitu terjadi ketika tujuan telah tercapai, dan saatnya bagi klien untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dan melanjutkan kehidupan mereka secara mandiri.
- 2) Intervensi yang bersifat "dipaksa," yaitu contohnya termasuk ketika seorang pekerja sosial meninggalkan lembaga, atau klien harus meninggalkan lembaga karena alasan tertentu atau kehilangan kelayakan untuk menerima layanan.
- 3) Intervensi yang "tidak direncanakan," yaitu terjadi jika klien tidak kembali, keluarganya pindah, atau klien kehilangan motivasi untuk melanjutkan pertemuan. Dalam beberapa kasus, aspek lain dari kehidupan klien mungkin menjadi prioritas daripada masalah yang awalnya ingin dipecahkan

2.3 Peranan Pekerja Sosial dalam *Community Work* dan *Group Work*

Pekerja sosial memiliki peran strategis dalam *community work* dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas lokal, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kegiatan praktikum komunitas, Praktikan berperan sebagai *broker* (penghubung) dan *empowerment* (pemberdaya). Sebagai penghubung, Praktikan menghubungkan korban penyalahgunaan NAPZA dan masyarakat dengan *stakeholder* serta sumber daya dan layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka yaitu menghubungkan *stakeholder* dari dinas pemerintah. Sebagai pemberdaya, Praktikan berperan membantu masyarakat mengenali kebutuhan, potensi, dan tantangan yang mereka hadapi. Proses ini melibatkan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat didorong untuk aktif berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kemudian dalam pelaksanaan praktikum menggunakan metode *group work*,

Praktikan berperan membantu Korban Penyalahgunaan NAPZA melalui peran sebagai edukator. Menurut Yessian dan Broskowski dalam (Sheafor & Horejsi, 2016) Edukator adalah seseorang yang memberikan informasi dan mengajarkan keterampilan kepada orang lain. Sedangkan Praktikan juga berperan sebagai fasilitator yaitu merupakan seseorang yang memandu pengalaman kelompok dalam suatu kegiatan.

2.4 Tinjauan Konseptual yang Terkait dengan Kasus yang di Tangani

Penanganan kasus yang dilaksanakan oleh penulis yaitu penyuluhan sosial dan pemberdayaan pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui pembentukan Satgas anti-Napza. Berikut adalah tinjauan yang mendasari penanganan kasus.

2.4.1 Pengertian NAPZA

NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, yaitu zat atau bahan yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat memengaruhi sistem saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, dan kesadaran, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan (BNN, 2023). Kemudian (WHO, 2022) menjelaskan bahwa Zat adiktif merupakan bahan psikoaktif yang dapat memengaruhi fungsi otak, menimbulkan ketergantungan, serta berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan sosial apabila digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan.

2.4.2 Jenis-Jenis NAPZA

Menurut Partodiharjo (2008) NAPZA dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari "cengkraman" nya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I (berbahaya), golongan II (daya adiktif kuat), dan golongan III (adiktif ringan).

2. Psikotropika

Psikotropika adalah suatu zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa (*psyche*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu golongan I (kuat), golongan II (kuat berguna untuk pengobatan), golongan III (sedang), dan golongan IV (ringan).

3. Bahan Adiktif

Golongan adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya seperti rokok, kelompok alkohol, minuman yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, *thinner* dan zat-zat lain, seperti lem kayu, aseton, cat, bensin, yang bila dihisap, dihirup, dan dicium, dapat memabukkan. Jadi alkohol, rokok, serta zat-zat lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan juga tergolong NAPZA.

2.4.3 Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA adalah suatu penyimpangan perilaku yang disebabkan oleh pengguna yang terus-menerus sampai terjadi masalah. Pengguna NAPZA dapat mengalami kondisi yaitu ketergantungan NAPZA merupakan suatu kondisi yang cukup berat dan parah sehingga mengalami sakit yang cukup berat ditandai dengan ketergantungan fisik (sindrom putus zat dan toleransi). Sindrom putus zat adalah suatu kondisi dimana individu yang menggunakan NAPZA, menurunkan atau menghentikan penggunaan NAPZA sehingga menimbulkan gejala kebutuhan terhadap NAPZA (Fardia & Yudi, 2010).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Menurut Sumiati (2009) ketergantungan terhadap NAPZA dibagi menjadi 2, yaitu ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis.

2.4.4 Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA menurut BNN (2009), meliputi:

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer atau pencegahan dini (preventif) yang ditujukan kepada mereka, individu, kelompok, atau komunitas yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan NAPZA, untuk melakukan intervensi agar individu, kelompok, dan masyarakat waspada serta memiliki ketahanan agar tidak menggunakan NAPZA. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak anak berusia dini, agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder ditujukan pada kelompok atau komunitas yang sudah menyalahgunakan NAPZA, dilakukan pengobatan atau rehabilitasi agar mereka tidak menggunakan NAPZA lagi.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier ditujukan kepada mereka yang sudah pernah menjadi penyalahguna NAPZA dan telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi untuk menjaga agar tidak kambuh lagi. Sedangkan pencegahan terhadap penyalahguna NAPZA yang kambuh kembali adalah dengan melakukan pendampingan yang dapat membantunya untuk mengatasi masalah perilaku adiksinya, detoksifikasi, maupun dengan melakukan rehabilitasi kembali.

2.4.5 Pengertian Pemberdayaan

Jim Ife (1997) menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Jim Ife juga menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni, konsep *power* (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Menurut Eko (2004) Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat.

2.4.6 Perspektif Pemberdayaan

Zubaedi (2013), penjelasan dari 4 perspektif pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang

dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah.

2. Perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya *power* dan kontrol yang kuat dari para elite.

3. Perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural.

4. Perspektif *post-strukturalis* menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat.

2.4.7 Jenis Kekuatan dalam Pemberdayaan

Menurut Jim Ife (1997) 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan, diantaranya:

1. Kemampuan menentukan pilihan pribadi.
2. Kemampuan menentukan kebutuhan sendiri.
3. Kebebasan berekspresi.
4. Kemampuan kelembagaan.
5. Akses pada sumber daya ekonomi.
6. Kebebasan dalam proses reproduksi.

2.4.8 Pengertian Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (1990) masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". Suatu

kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui apa warga warganya dapat saling berinteraksi, suatu negara modern misalnya merupakan suatu kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi.

Menurut W. F Connell (1972) menyimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok yang berfikir tentang diri mereka sendiri sebagai kelompok yang berbeda, diorganisasi, sebagai kelompok yang diorganisasi secara tetap untuk waktu yang lama dalam rintang kehidupan seseorang secara terbuka dan bekerja pada daerah geografis tertentu. Kelompok orang yang mencari penghidupan secara berkelompok, sampai turun-temurun dan mensosialkan anggota-anggotanya melalui pendidikan. Seorang yang mempunyai sistem kekerabatan yang terorganisasi yang mengikat anggota-anggotanya secara bersama dalam keseluruhan yang terorganisasi.

2.4.9 Unsur-Unsur Masyarakat

Menurut Slamet Santosa (2004) ada beberapa unsur yang menjadi syarat bagi kelompok manusia untuk bisa disebut masyarakat. Beberapa syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya dua orang atau lebih manusia pada kelompok tersebut dan berada di tempat yang sama.
2. Adanya kesadaran dari setiap anggotanya, bahwa mereka merupakan bagian dari sebuah kesatuan.
3. Adanya proses interaksi yang cukup lama di mana dari hasil interaksi ini akan tercipta anggota baru yang bisa berkomunikasi serta mampu menciptakan aturan dari setiap anggotanya.
4. Menciptakan sebuah kebudayaan dari hasil pemikiran bersama yang disepakati dan menjadi media penghubung diantara setiap anggotanya.

2.4.10 Ciri-Ciri Masyarakat

Masyarakat ditandai dengan adanya hubungan sosial antara anggota kelompok masyarakat. Jadi, secara ringkasnya ciri-ciri masyarakat menurut Slamet Santosa (2004) adalah adanya:

1. Daerah/batas tertentu.
2. Manusia yang bertempat tinggal.
3. Kehidupan masyarakat.
4. Hubungan sosial antar anggota kelompoknya.

2.4.11 Pengertian Organisasi

Menurut Mc. Farland dalam Handyaningrat (1980) mengungkapkan pengertian organisasi suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan. Menurut G.R Terry dalam Sarwoto (1991) mendefinisikan organisasi berasal dari bahasa *organism* yaitu suatu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan. Jadi sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.

2.4.12 Ciri-Ciri Organisasi

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diberikan ciri-ciri organisasi sebagai berikut:

1. Adanya kegiatan kelompok orang yang dapat dikenal.
2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain yang saling berkaitan yang merupakan kesatuan usaha/kegiatan.
3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya/tenaga.
4. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan.
5. Adanya suatu tujuan.

2.4.13 Bentuk-Bentuk Organisasi

Menurut Handyaningrat (1980) terdapat bentuk-bentuk organisasi terdiri:

1. Organisasi Lini/garis (*Line Organization*)

Organisasi ini mempunyai bentuk sederhana. Bentuk organisasi ini terdapat pada organisasi militer. Dalam organisasi lini/garis ini bawahan hanya mengenal satu atasan/pimpinan, sebagai sumber daripada kewenangan, yang memberikan perintah/instruksi. Bawahan hanya bertindak sebagai pelaksana, sekalipun para pelaksana tidak seluruhnya melaksanakan secara langsung tercapainya tujuan/tugas pokok organisasi.

2. Organisasi Lini/garis dan Staf (*Line and Staff Organization*)

Organisasi lini dan staf adalah organisasi yang pada umumnya dipergunakan pada organisasi pemerintah. Organisasi ini terdiri atas unit-unit lini/garis dan unit-unit staf. Dalam organisasi ini telah dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lini (*line*) adalah orang-orang atau unit-unit secara langsung ikut serta melaksanakan tercapainya tugas pokok/tujuan organisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan staf disini dalam arti staf pembantu, yaitu unit-unit yang tidak secara langsung ikut

serta mencapai tujuan organisasi, tetapi hanya memberikan kontribusinya dalam hal-hal yang tidak langsung, dengan menyediakan bantuan dibidang kepegawaian, keuangan, material, dan bantuan lainnya.

3. Organisasi Fungsi (*Functional Organization*)

Organisasi fungsi ini pada umumnya terdapat pada organisasi niaga. Dalam organisasi fungsi ini disusun atas dasar kegiatan dari tiap-tiap fungsi sesuai dengan kepentingan perusahaan, dimana tiap-tiap fungsi/kepentingan seolah-olah terpisah berdasarkan atas bidang keahliannya.

4. Organisasi Panitia (*Committe Organization*)

Panitia adalah sekelompok orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus, yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh seseorang atau sebuah Dewan (banyak orang). Disamping panitia, terdapat istilah lain semacam panitia ini, yaitu yang disebut: Satuan Tugas (*Task Force*). Yang dimaksud dengan Gugus Tugas ialah kelompok sementara yang terdiri daripada orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, yang diambil/ditunjuk dari berbagai unit organisasi/instansi, yang bertugas untuk melaksakan tugas tertentu. Apabila tugas tertentu ini sudah selesai maka Gugus Tugas ini dibubarkan.

2.5 Regulasi yang Mendukung Praktikum Komunitas

Regulasi yang mendukung penanganan fokus masalah penyalahgunaan NAPZA dalam kegiatan praktikum komunitas di Desa Situsari, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan, memperkuat daya tahan sosial, serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, terutama yang rentan dan mengalami masalah sosial. UU ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara melalui pelayanan sosial dan pemberdayaan, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara bersama.

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial

Undang-Undang ini mengatur tentang profesi pekerja sosial, mencakup standar kompetensi, etika profesi, dan perlindungan hukum bagi pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya. UU ini bertujuan untuk mengakui dan menguatkan peran pekerja sosial sebagai profesi yang berkompeten dalam memberikan pelayanan sosial, termasuk upaya pencegahan, penanganan,

serta pemulihan masalah sosial. UU ini juga mengatur tentang sertifikasi dan lisensi pekerja sosial, memastikan bahwa mereka memiliki kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan untuk memberikan layanan yang profesional dan berkualitas.

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya Peraturan Menteri Sosial ini merupakan aturan yang sangat penting dalam upaya mengatasi masalah penularan NAPZA di Indonesia. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang standar yang harus dipenuhi oleh lembaga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban konverter narkoba.
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Permensos menyebutkan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik fisik dan spiritual maupun sosial secara mampu dan wajar. Salah satu kategori dari PPKS tersebut yaitu Korban Penyalahgunaan NAPZA, maka dengan adanya regulasi tersebut dapat menjadi landasan pembentukan Tim Relawan Satuan Tugas Anti NAPZA yang nantinya sebagai bentuk tindakan preventif agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan NAPZA.
5. Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang undang menyebutkan bahwa Rrehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.
Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika instansi yang berwenang melakukan proses rehabilitasi adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) yang sudah diatur dalam pasal 70 sampai pasal 72 memiliki tugas dan wewenang yang mendukung pembentukan Tim Relawan Satuan Tugas Anti NAPZA, pasal diantaranya: (2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, (5) Memberdayakan masyarakat dalam rangka pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, (6) Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

6. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Perda Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 merupakan payung hukum yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di wilayah Kabupaten Kuningan. Perda ini mengakui bahwa narkoba merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Landasan hukum ini dapat menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

7. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Di Kabupaten Kuningan
- Perbup ini mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan termasuk peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN) di wilayah Kabupaten Kuningan. Tujuan utama dari Perbup ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, serta mewujudkan masyarakat Kuningan yang sehat dan produktif melalui Tindakan pencegahan, penanggulangan, pemantauan dan evaluasi.

BAB III

KONTEKS PRAKTIKUM KOMUNITAS

3.1 Gambaran Umum Komunitas Lokasi Praktikum

3.1.1 Sejarah Desa Situsari

Sekitar tahun 1982 Desa Situsari masih tergabung dengan Desa Gunungsirah yaitu bernama Kampung Situsari Desa Gunungsirah yang di pimpin oleh kepala Desa yang bernama Bapak Nusi, Kampung Situsari pada dahulunya merupakan tempat persembunyian warga desa Gunungsirah Ketika terjadi Gerakan DI (Gorombolan) Kata warga, nama Kampung Situsari diambil dari istilah “Cai Nyumput” yang artinya tempat persembunyian, maka sejak itulah terkenal dengan sebutan Situsari. Menurut legenda dulunya kampung Situsari merupakan daerah istirahat Para wali Songo. Menurut sumber yang dapat di percaya kampung Situsari mempunyai beberapa tokoh yang mumpuni Syekh Ahmad Bin Huas, yang merupakan tokoh Ulama (Wali) kampung Situsari. Tahun 1982 Kampung Cirumput menjadi pemekaran dari Desa Gunungsirah menjadi Desa Situsari yang dipimpin oleh seorang PJS yang bernama Bapak H Bahrudin dengan dibantu seorang juru tulis yang bernama Bapak Ugan Sugandi sampai tahun 1986.

Nama Desa Situsari berasal dari Cirumput/Cai nyumput (Balong Situ) yang sekarang dikenal dengan nama Balong Cirumput. Ketika itu ada seorang wali besar yang sangat terkenal dan tersohor sebagai seorang yang memiliki peranan yang sangat penting. Selain arif dan bijaksana juga memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap sesama. Karena kebersihan hatinya Sunan Situsari memiliki dan menguasai ilmu putih yang disebut Halimunan beliau pergi dan beristirahat dekat kolam yang tersembunyi yang sekarang di sebut “Desa Situsari”

Sunan Situsari (Mbah Sekh Ahmad) berasal dari Pamijahan Pangandaran, Sunan Situsari lebih memilih tinggal di kampung Cirumput desa Gunungsirah Bersama kedua putrinya (Nyi rarangan dan nyimas sri asih). Tokoh ulama yang memiliki dua putri yang cantik dan menawan” suatu ketika ada yang ingin melamar anak sulung dari Sunan Situsari, namun karena si pelamar dianggap kurang baik dalam agamanya maka ayahanda (sekh Ahmad Bin huas) tidak merestui hubungan mereka maka sang putri (Nyi rarangan). Berjanji tidak akan menikah sampai akhir hayatnya. Semenjak tragedi itulah maka di Desa Situsari masih

kental dengan magis, setiap generasi warga situsari selalu ada perempuan atau laki-laki yang tidak memiliki pasangan sampai saat ini.

3.1.2 Letak Geografis

Desa Situsari merupakan salah satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Darma yang memiliki struktur daerah perbukitan yang luas wilayahnya sekitar 204.4 hektar yang memiliki batas wilayah Sebelah Utara Kaki Gunung Ciremai, Sebelah Selatan Desa Darma dan Desa Karanganyar, Sebelah Barat Desa Gunungsirah, Sebelah Timur Desa Karang Sari dan Desa Bakom. Dan terbagi ke dalam dua dusun yaitu Dusun Situsari 1 yang terdiri dari Rt 01, Rt 02, Rt 03 Dusun Situsari 2 yang terdiri dari RT 04, RT 05 Desa Situsari mempunyai iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, musim yang ada sangat berpengaruh sekali terhadap pola pertanian yang ada.

Tabel.3.1.Letak Geografis

No	Keterangan	Luas (hektare)	Presentase
1.	Pemukiman	52	23,51%
2.	Perkebunan	150	67,81%
3.	Fasilitas Umum	0,8	0,36%
4.	Lainnya	18,4	8,32%
Luas Wilayah Desa Situsari		220.8	100%

Sumber: Profil Desa Situsari

Berdasarkan tabel pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa luas wilayah Desa Situsari terbagi ke dalam beberapa peruntukan lahan dengan total luas sebesar 220,8 hektare. Penggunaan lahan terbesar adalah untuk perkebunan, yaitu seluas 150 hektare, yang menunjukkan bahwa Desa Situsari memiliki karakteristik wilayah agraris dengan potensi sumber daya alam yang dominan pada sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat kemungkinan besar bergantung pada pengelolaan lahan perkebunan.

Selanjutnya, pemukiman menempati luas 52 hektare, yang mengindikasikan adanya konsentrasi penduduk yang cukup signifikan namun masih seimbang dengan ketersediaan lahan produktif. Fasilitas umum memiliki luas yang relatif kecil, yaitu 0,8 hektare, yang mencakup sarana penunjang kehidupan masyarakat seperti balai desa, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah. Sementara itu, kategori lainnya memiliki luas 18,4 hektare yang dapat mencakup lahan kosong, jalan, atau peruntukan lain di luar kategori utama. Secara keseluruhan, pembagian luas wilayah ini memberikan gambaran bagi praktikan mengenai kondisi geografis dan

tata guna lahan Desa Situsari, yang menjadi dasar penting dalam memahami konteks sosial, ekonomi, serta perencanaan intervensi dalam pelaksanaan Praktikum Komunitas.

3.1.3 Kondisi Demografis

Tabel.3.2.Kondisi Demografis

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	884	53,06%
2.	Perempuan	782	46,94%
Jumlah		1.666	100,00%

Sumber:Profil Desa Situsari

Berdasarkan tabel kondisi demografis pada gambar tersebut, jumlah penduduk Desa Situsari tercatat sebanyak 1.666 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 884 jiwa, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 782 jiwa. Data ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, meskipun selisihnya tidak terlalu signifikan.

Bagi praktikan, kondisi demografis ini memberikan gambaran awal mengenai struktur penduduk Desa Situsari yang penting sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan praktikum komunitas. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat memengaruhi pola partisipasi masyarakat dalam berbagai program, termasuk kegiatan pemberdayaan, kesehatan, dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap data demografis ini menjadi landasan dalam merancang intervensi yang inklusif serta menyesuaikan pendekatan program dengan karakteristik masyarakat Desa Situsari.

3.1.4 Sarana Pendidikan

Berikut merupakan tabel kondisi Sarana Pendidikan di Desa Situsari.

Tabel.3.3.Sarana Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	20,00%
2.	Sekolah Dasar (SD)	1	20,00%
3.	Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA)	3	60,00%
Jumlah		5	100,00%

Sumber:Profil Desa Situsari

Berdasarkan tabel kondisi pendidikan pada gambar di atas, Desa Situsari memiliki beberapa sarana pendidikan yang menunjang proses pembelajaran masyarakat, baik pendidikan formal maupun nonformal. Tercatat terdapat 1 unit

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai sarana pendidikan dasar bagi anak usia dini, serta 1 unit Sekolah Dasar (SD) yang berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan formal pada jenjang dasar. Selain itu, terdapat 3 unit Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang berfungsi sebagai sarana pendidikan keagamaan dan pembinaan nilai-nilai moral bagi anak-anak dan remaja di desa.

Kondisi pendidikan ini memberikan gambaran mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Situsari yang masih terbatas pada jenjang dasar dan pendidikan nonformal keagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan akses dan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan lanjutan. Informasi ini menjadi dasar penting bagi praktikan dalam memahami konteks sosial masyarakat serta merancang program pemberdayaan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas anak, remaja, dan keluarga di bidang pendidikan.

3.1.5 Kondisi Ekonomi

Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Situsari berada pada sektor pertanian, khususnya sebagai petani dan buruh tani, baik yang mengelola lahan perkebunan maupun persawahan, serta sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan. Kondisi ini tidak terlepas dari karakteristik geografis Desa Situsari yang masih didominasi oleh lahan tegalan dan perkebunan, sehingga secara struktural mendukung aktivitas pertanian sebagai sektor utama perekonomian masyarakat desa.

Potensi sumber daya lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membudidayakan berbagai komoditas pertanian, seperti padi, singkong, dan tanaman pangan lainnya yang menjadi penopang kebutuhan hidup serta sumber pendapatan rumah tangga. Dominasi mata pencaharian di sektor pertanian menunjukkan bahwa Desa Situsari memiliki potensi sumber daya manusia yang besar dalam pengelolaan dan pengembangan pertanian berbasis lokal.

Keberadaan dan penguatan kelompok tani menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan produktivitas para petani. Melalui kelompok tani, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan pengetahuan dan teknologi, serta dukungan ekonomi pedesaan yang lebih terorganisir. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan mendukung pembangunan ekonomi desa secara berkelanjutan.

3.1.6 Kondisi Sosial, Budaya dan Spiritual

Aspek sosial dan keagamaan, seluruh penduduk Desa Situsari menganut agama Islam, yang secara signifikan membentuk pola kehidupan sosial masyarakat yang religius. Nilai-nilai keagamaan tercermin dalam aktivitas keseharian masyarakat, di mana kegiatan keagamaan masih berlangsung secara aktif dan berkesinambungan. Hal ini ditandai dengan adanya pengajian rutin yang dilaksanakan hampir setiap hari, serta peringatan hari-hari besar keagamaan seperti kegiatan muludan atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain kuatnya kehidupan keagamaan, masyarakat Desa Situsari juga tetap melestarikan tradisi dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Perpaduan antara budaya Sunda dan nilai-nilai Islam tampak nyata dalam berbagai kegiatan adat dan kesenian tradisional. Salah satu bentuk kesenian yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat adalah seni rudat, yang berfungsi sebagai media penyampaian syair dan pesan-pesan keagamaan Islam oleh para ulama dan santri kepada masyarakat.

Kesenian rudat diikuti oleh warga Desa Situsari dari berbagai kelompok usia, mulai dari generasi muda hingga lanjut usia, sehingga menjadi sarana pemersatu sekaligus media pewarisan nilai budaya dan keagamaan. Tradisi lainnya yang masih dilestarikan oleh masyarakat antara lain mungghahan sebagai bentuk penyambutan datangnya bulan suci Ramadan serta muludan sebagai peringatan bulan Maulid. Keberlangsungan tradisi dan kegiatan keagamaan tersebut mencerminkan kuatnya integrasi antara nilai budaya lokal dan ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Situsari.

3.1.7 Visi dan Misi Desa Situsari

1. Visi

“Terwujudnya Desa Wisata yang Maju Unggul Mandiri dan Agamis Melalui Desa Unggul Dalam Prestasi”

Dalam visi Desa Situsari tersebut terdapat beberapa kata kunci yaitu maju, mandiri, kondusif, Sejahtera dan unggul merupakan representasi terhadap beberapa kondisi berikut:

- 1) Maju, artinya perkembangan pemerintah Desa Situsari selalu menuju ke arah perbaikan dan mengikuti perkembangan zaman.
- 2) Mandiri, mengandung arti bahwa Desa Situsari dalam segala bidang memiliki hak otonomi yang mantap tanpa ketergantungan pada pihak

lain. Serta mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

- 3) Unggul, mengandung arti bahwa dengan beragam potensi yang dimiliki Desa Sitisari akan mampu berprestasi minimal sam maksimal lebih dari desa lain, dalam segala bidang.

2. Misi

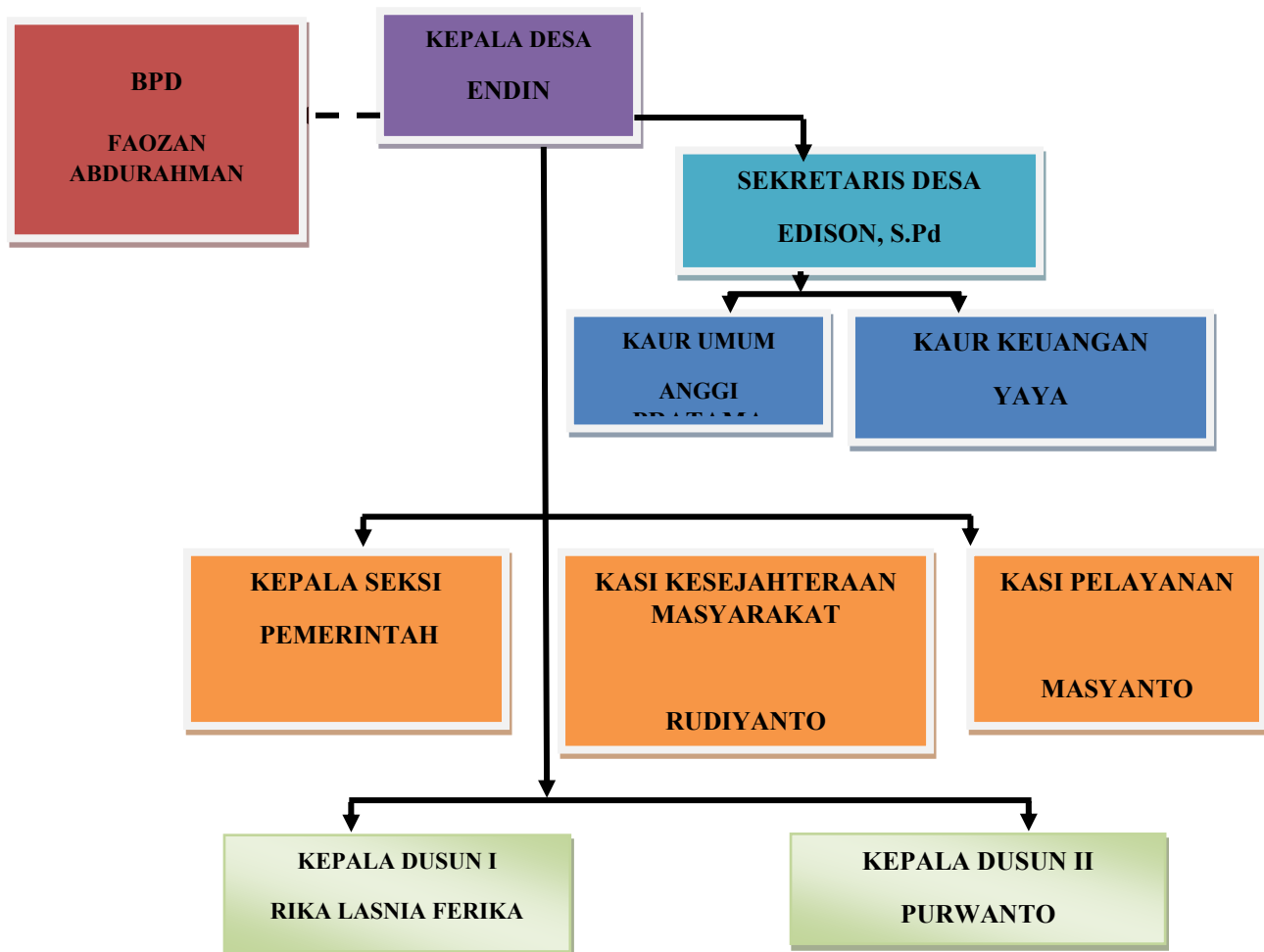
Misi desa situsari sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan lingkungan Masyarakat yang aman, tertib, dan teratur.
- 2) Mewujudkan lingkungan Masyarakat yang mandiri dengan membangun semangat kebersamaan, musyawarah, gotong royong dan Kerjasama antar warga Masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan Pembangunan.
- 3) Meningkatkan dan memantapkan pencapaian angka indeks Pembangunan manusia melalui akselerasi peningkatan derajat Pendidikan, Kesehatan, ekonomi serta daya beli Masyarakat.
- 4) Meningkatkan dan memantapkan SDM melalui akselerasi peningkatan derajat Pendidikan, Kesehatan, ekonomi serta daya beli Masyarakat menuju desa unggul dan berprestasi.

3.1.8 Struktur Pemerintahan Desa Situsari

Bagan.3.1.Struktur Organisasi Pemerintah Desa Situsari

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SITUSARI KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN



Sumber: Profil Desa Situsari

Struktur organisasi Pemerintah Desa Situsari di atas menunjukkan pola hierarki yang jelas dan sistematis dalam pembagian tugas pemerintahan desa. Tingkat tertinggi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga legislatif desa yang menjalankan fungsi pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat. Di sisi eksekutif, Kepala Desa menempati posisi sentral sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan desa, yang secara langsung membawahi Sekretaris Desa. Sekretaris Desa berfungsi sebagai koordinator administrasi dan pembantu teknis Kepala Desa, serta membawahi dua urusan

utama yaitu Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan. Mencerminkan pemisahan fungsi administratif dan keuangan guna meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Struktur tersebut mencakup tiga kepala seksi, yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, dan Seksi Pelayanan. Ketiga seksi ini mengemban fungsi operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Kehadiran kepala dusun pada tingkat terbawah memperlihatkan mekanisme desentralisasi internal, yang memungkinkan pelayanan masyarakat dilakukan secara lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan warga di masing-masing wilayah dusun. Keseluruhan, struktur organisasi ini mencerminkan pembagian tugas yang proporsional, alur koordinasi yang jelas, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel.

3.2 Program/Layanan yang diberikan Komunitas (di bikin tabel)

3.2.1 Program/Layanan Administrasi Kependudukan

Program/Layanan administrasi kependudukan di Desa Sitsuari dilaksanakan oleh pemerintah Desa melalui Sekretaris Desa serta kaur. Layanan ini membantu Masyarakat dalam pengurusan berbagai dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), surat pindah domisili, serta pencatatan penting seperti akta kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian. Selain itu, pemerintah Desa juga menyediakan layanan pembuatan surat menyurat, seperti Surat Keterangan Usaha (SKU), keterangan domisili, surat pembelian tanah dan dokumen administratif lain yang dibutuhkan oleh Masyarakat Desa Sitsuari.

3.2.2 Program/Layanan Kesejahteraan

Program/layanan kesejahteraan dilaksanakan melalui kasi kesejahteraan yang bertugas untuk mengoordinasikan berbagai program untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat Desa Sitsuari. Layanan yang diberikan antara lain membantu proses pengajuan bantuan, pendapatan penerima manfaat, hingga menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, Program bantuan yang disalurkan untuk mendukung kesejahteraan sosial Masyarakat desa dari pemerintahan pusat, provinsi maupun daerah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), sembako, BPJS, Makanan Bergizi Gratis

(MBG). Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Masyarakat yang membutuhkan mendapatkan bantuan secara tepat sasaran.

3.2.3 Program/Layanan Kesehatan

Program/layanan Kesehatan di Desa Sitisari diselenggarakan dengan menjalin kerja sama dengan Puskesmas Darma untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan Kesehatan, seperti melaksanakan kegiatan posyandu untuk ibu dan anak, posyandu remaja yang berfokus pada edukasi Kesehatan dan pengawasan Kesehatan remaja, dan posbindu untuk pemeriksaan Kesehatan rutin bagi lanjut usia, kelas ibu hamil, serta penyuluhan Kesehatan yang membahas berbagai isu Kesehatan seperti gizi, sanitasi, stunting, dan isu Kesehatan lainnya. Program ini mendukung Upaya peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat Desa Sitisari.

3.2.4 Program/Layanan Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban

Program ini dilakukan oleh Desa Sitisari melalui kasi pemerintahan, yang bertugas untuk mengurus administrasi pemerintahan dan menjaga ketertiban wilayah. Layanan yang diberikan yaitu peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Desa Sitisari yang berkoordinasi dengan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Babinsa, dan Bhabinkamtibnas untuk menjaga keamanan lingkungan, peningkatan peran Karang Taruna, serta mendorong partisipasi Masyarakat dalam kerja bakti. Program ini dilakukan untuk mengajak Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membangun lingkungan desa yang aman, tertib, dan kondusif bagi Masyarakat.

3.3 Profil Penerima Manfaat Program/Layanan Komunitas

Penerima manfaat dari program dan layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Sitisari Adalah seluruh Masyarakat desa sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Adapun rincian profil penerima manfaat berdasarkan program/layanan yang diberikan Desa Sitisari, yaitu:

1. Penerima program/layanan administrasi kependudukan

Layanan ini ditujukan untuk seluruh warga yang membutuhkan bantuan administrasi, seperti pengurusan dokumen kependudukan (KTP, KK, surat pindah domisili, dan dokumen lainnya), baik individu maupun keluarga. Masyarakat yang memanfaatkan layanan ini cenderung berasal dari kelompok usia produktif hingga lanjut usia yang memerlukan dokumen resmi untuk berbagai keperluan seperti pekerjaan, Pendidikan, akses layanan sosial, atau perpindahan tempat tinggal.

2. Penerima program/layanan kesejahteraan

Kelompok penerima manfaat utama pada layanan ini ditujukan bagi Masyarakat rentan dan kurang mampu. Mereka termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan sembako, dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, layanan ini juga mencakup bantuan akses jaminan Kesehatan melalui program BPJS yang memberikan perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat kurang mampu.

3. Penerima program/layanan pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban

Layanan ini ditujukan untuk melayani komunitas secara kolektif, khususnya pihak-pihak yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa, seperti linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Karang Taruna. Warga yang terlibat aktif dalam Pembangunan keamanan dan kenyamanan lingkungan, seperti pemuda, tokoh Masyarakat, dan anggota Linmas, merupakan penerima manfaat utama. Selain itu seluruh Masyarakat Desa Sitisari secara tidak langsung menjadi penerima manfaat karena program ini menghasilkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif untuk kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, penerima manfaat dari program dan layanan Desa Sitisari mencakup berbagai kelompok Masyarakat, mulai dari individu, keluarga, hingga komunitas local. Setiap program dirancang untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat secara menyeluruh, mulai dari administrasi dasar, kesejahteraan sosial, Kesehatan, keamanan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi.

BAB IV

PENANGANAN KASUS

4.1 Tahap Membangun Relasi (*Dialog*)

Tahap persiapan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dengan komunitas dimulai dengan membangun relasi atau melakukan dialog. Tahap membangun relasi merupakan langkah awal dalam praktik pekerjaan sosial makro yang bertujuan menciptakan hubungan serta pemahaman bersama antara praktikan dengan masyarakat maupun pihak terkait. Kegiatan ini dilakukan melalui proses pengenalan, penjelasan mengenai tujuan program, serta sosialisasi tentang 12 PAS. Tujuannya adalah membangun kepercayaan, memperoleh dukungan, serta memastikan masyarakat memahami dan terlibat dalam setiap proses pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Tahap persiapan sosial ini, praktikan menggunakan teknik *community meeting* atau pertemuan dengan warga, baik dalam bentuk formal maupun informal.

4.1.1 Proses

Proses membangun relasi, praktikan memulai kegiatan dengan melakukan silaturahmi kepada perangkat Desa Situsari serta memberikan sosialisasi mengenai 12 PAS. Praktikan juga menggunakan strategi dialog, baik secara formal maupun informal, melalui kunjungan kepada tokoh-tokoh kunci masyarakat seperti aparat desa, RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan. Selain itu, praktikan melakukan *community involvement* dengan ikut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat atau kelompok lokal. Teknik yang digunakan meliputi *transect walk*, *home visit*, serta diskusi informal untuk memperoleh informasi, membangun kepercayaan, dan memahami kebutuhan serta potensi masyarakat. Tahap membangun relasi dilaksanakan pada 27 Oktober sampai 03 November di Desa Situsari. Adapun langkah-langkah kegiatannya sebagai berikut:

1. Perkenalan diri dan penyampaian tujuan kedatangan ke Desa Situsari
Tahap ini dimulai dengan kehadiran praktikan di Balai Desa Situsari pada tanggal 27 Oktober 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sesi ini, praktikan memperkenalkan diri sebagai mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang sedang melaksanakan praktik pada bidang Pengembangan Masyarakat dan

Komunitas. Praktikan bersama Dosen Pembimbing menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan ke Desa Sitisari untuk melaksanakan praktik lapangan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Praktikan menegaskan bahwa kegiatan ini tidak semata-mata merupakan tuntutan akademik, tetapi juga bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat. Sesi tersebut pada, praktikan turut menyampaikan pentingnya dukungan dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan seluruh warga untuk mendukung kelancaran kegiatan. Praktikan menekankan bahwa praktik ini hanya dapat berjalan optimal dengan partisipasi aktif dari masyarakat pada seluruh tahapan, yang dimulai dari tahap asesmen hingga tahap terminasi dan tahap rujukan secara sistematis.

2. Penjelasan tahapan Praktikum Komunitas

Tanggal 27 Oktober 2025, praktikan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 hari praktik. Praktikan memaparkan bahwa rangkaian kegiatan tersebut terdiri atas beberapa tahap utama, yaitu Tahap Membangun Relasi, Tahap Asesmen (*Discovery*), Tahap Perencanaan Intervensi, Tahap Pelaksanaan Intervensi (*Development*), Tahap Evaluasi, serta Tahap Terminasi dan Rujukan. Kegiatan akan diakhiri dengan penyerahan hasil praktik kepada masyarakat atau pihak desa, disertai rekomendasi untuk keberlanjutan program. Dalam penjelasannya, praktikan menekankan pentingnya peran serta masyarakat di setiap tahap, karena keberhasilan program sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait.

3. Berkunjung ke *Stakeholder*

Praktikan memulai tahap ini dengan melakukan *home visit* atau kunjungan kepada tokoh-tokoh kunci masyarakat seperti Perangkat Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Ketua RT, Kepala Desa, Ketua PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat lainnya pada tanggal 28-30 Oktober 2025. Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, praktikan memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan praktikum, serta mendengarkan berbagai masukan mengenai kondisi sosial desa. Praktikan juga membuka ruang dialog dengan para tokoh untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai situasi masyarakat. Seluruh proses berlangsung dalam suasana yang hangat dan informal.

4. *Community Involvement*

Kegiatan *Community Involvement* atau keterlibatan praktikan dalam aktivitas masyarakat dilakukan sebagai upaya mempererat hubungan, mendekatkan diri, serta membaur dengan warga melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di Desa Situsari. Melalui keterlibatan ini, praktikan memperoleh kesempatan untuk memahami nilai-nilai, norma sosial. Selain itu, kegiatan ini dimanfaatkan untuk memperluas jaringan komunikasi, membangun keakraban, dan mengenal lebih jauh kehidupan sehari-hari masyarakat. Adapun bentuk kegiatan yang diikuti oleh praktikan adalah sebagai berikut:

1) Senam bersama ibu PKK

Senam bersama dengan Ibu-Ibu PKK di Balai Desa Situsari merupakan salah satu bentuk keterlibatan praktikan dalam kegiatan rutin masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan diikuti oleh anggota PKK serta warga sekitar. Melalui partisipasi dalam senam tersebut, praktikan tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga membangun kedekatan dan hubungan yang lebih hangat dengan para ibu PKK. Interaksi yang terjalin selama kegiatan memungkinkan praktikan untuk memahami dinamika sosial, pola komunikasi, serta kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk memperluas jaringan dan memperkuat kepercayaan antara praktikan dan komunitas Desa Situsari.

2) Sosialisasi 12 PAS

Jumat, 31 Oktober 2025, setelah berlangsungnya pelantikan aparat Desa Situsari di Balai Desa, praktikan melanjutkan rangkaian kegiatan dengan memberikan sosialisasi mengenai 12 PAS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial), serta penjelasan terkait *Target Group*, *Support Group*, dan *Interest Group*. Sosialisasi ini diarahkan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai berbagai isu sosial yang mungkin muncul di lingkungan desa, sekaligus mengenalkan kategori kelompok yang menjadi sasaran, pendukung, dan peminat dalam proses pemberdayaan. Melalui kegiatan ini, praktikan berupaya menumbuhkan kesadaran bahwa penanganan permasalahan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi

memerlukan partisipasi aktif seluruh warga. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peka, responsif, dan berperan dalam upaya penguatan kesejahteraan sosial di Desa Situsari.

3) Posbindu (Pos Binaan Terpadu)

Kegiatan Posbindu di Desa Situsari merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap satu bulan sekali. Praktikan turut serta dalam kegiatan Posbindu yang bertempat di Balai Desa Situsari. Posbindu di desa situsari telah menerapkan sistem ILP (Integrasi Layanan Primer) dengan sasaran yang mencakup berbagai kelompok, mulai dari ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan anak pra-sekolah (0–6 tahun), anak usia sekolah dan remaja (>6–18 tahun), usia dewasa (>18–59 tahun), hingga kelompok lanjut usia (>59 tahun). Melalui sistem ILP, Posbindu menyediakan paket pelayanan yang lebih komprehensif, meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, deteksi dini, pemberian imunisasi, serta suplementasi gizi. Selama kegiatan berlangsung, praktikan berperan aktif dalam membantu proses administrasi, seperti pendataan ibu hamil, bayi, serta peserta lainnya. Praktikan juga mendampingi sesi penyuluhan yang diberikan oleh kader Posbindu, sekaligus mengamati secara langsung proses pemberian imunisasi dan pelaksanaan deteksi dini kesehatan pada anak. Keterlibatan ini tidak hanya menambah wawasan praktikan mengenai pelaksanaan layanan kesehatan berbasis komunitas, tetapi juga memperkuat pemahaman tentang dinamika pelayanan sosial dan kesehatan masyarakat di Desa Situsari.

4.2 Tahap Asesmen (*Discovery*)

Setelah membangun relasi dengan masyarakat melalui tahap dialog, rentan waktu tanggal 1 November-11 November 2025 praktikan melanjutkan kegiatan tahap *discovery* atau asesmen.

4.2.1 Proses Praktik Tahap Asesmen

Tahap ini, praktik melakukan beberapa teknik, diantaranya:

1. *Transect Walk* dan *Social Mapping*

Praktikan melaksanakan kegiatan *transect walk* di Desa Situsari bersama perangkat desa sebagai upaya untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi lingkungan, potensi wilayah, serta permasalahan yang ada di setiap dusun.

Melalui kegiatan ini, praktikan dan perangkat desa berjalan menyusuri area pemukiman, fasilitas umum, lahan pertanian, serta titik-titik yang dianggap penting oleh masyarakat. Selama proses *transect walk*, praktikan mengamati berbagai aspek fisik dan sosial desa, sekaligus berdiskusi dengan perangkat desa untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika kehidupan warga. Kegiatan ini menjadi dasar penting dalam proses asesmen karena memberikan informasi nyata yang dibutuhkan untuk merumuskan rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Foto 4. 1. *Transect Walk dan Social Mapping*

Hasil dari kegiatan *transect walk* tersebut diwujudkan dalam bentuk *social mapping* yang menggambarkan potensi, permasalahan, serta kondisi sosial yang ada di setiap bagian wilayah Desa Sitisari. Melalui proses pemetaan sosial ini, praktikan dapat menyusun gambaran yang lebih jelas mengenai sebaran fasilitas umum, kondisi pemukiman, aktivitas masyarakat, serta sumber daya lokal yang dapat diberdayakan. *Social mapping* ini menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas kebutuhan masyarakat dan merancang intervensi yang tepat sasaran. Kemudian, pemetaan sosial membantu memperkuat pemahaman praktikan mengenai dinamika desa secara holistik, sehingga proses perencanaan program dapat dilakukan lebih partisipatif dan responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.



Gambar.4. 1. *Hasil Social Mapping*

2. Wawancara dan Studi Dokumentasi

Kegiatan ini dilaksanakan sejak awal tahap dialog hingga tahap discovery, di mana proses wawancara dan observasi dilakukan oleh praktikan ketika bertemu dengan masyarakat, baik dalam pertemuan informal maupun formal. Melalui interaksi tersebut, praktikan berupaya menggali berbagai persoalan serta potensi yang ada di Desa Sitisari. Diharapkan, informasi yang diperoleh dari masyarakat dapat menjadi dasar pemahaman yang lebih jelas ketika memasuki kegiatan *community meeting* seperti MPA dan SLA, sehingga praktikan mampu mengidentifikasi kondisi nyata yang terjadi di lingkungan desa. Selain melakukan wawancara dengan warga, praktikan juga melakukan penggalian informasi melalui wawancara dengan pihak pemerintah desa dan institusi terkait lainnya, termasuk Perangkat Desa dan Kepolisian RI melalui Polsek Darma, guna mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai situasi sosial di Desa Sitisari.

3. *Method of Participatory Assessment* (MPA)

Method Participatory Assessment (MPA) dalam pekerjaan sosial adalah pendekatan kolaboratif untuk menilai kebutuhan, potensi, dan masalah bersama pemangku kepentingan (*stakeholder*), khususnya masyarakat miskin dan rentan, untuk merancang program yang berkelanjutan, melibatkan teknik seperti Klasifikasi Kesejahteraan (*Wealth Classification*), pemetaan aset desa, diskusi kelompok, wawancara mendalam, dan observasi lapangan untuk menghasilkan data kualitatif dan kuantitatif yang relevan dan memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan.

Praktikan melaksanakan kegiatan Metode Asesmen Partisipatif (MAP/MPA) dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan serta potensi yang terdapat di Desa Sitisari. MAP/MPA, yang dikenal juga sebagai kegiatan *rembug warga* atau *community meeting*, dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025. Kegiatan ini bertempat di Balai Desa Sitisari, dipilih karena lokasinya yang strategis dan mudah diakses oleh seluruh warga, sehingga menjadi titik pusat aktivitas masyarakat. Dalam pelaksanaannya, praktikan mengundang berbagai pihak terkait, antara lain perangkat desa, kader PKK, dan masyarakat umum. Melalui forum ini, diharapkan seluruh peserta dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, serta informasi yang relevan sehingga identifikasi masalah dan potensi desa dapat dilakukan lebih komprehensif dan partisipatif.

Praktikan berperan aktif sebagai pendamping selama kegiatan berlangsung dengan memberikan dukungan penuh kepada warga dalam setiap proses diskusi. Peran tersebut diwujudkan melalui penjelasan ulang terhadap materi yang telah disampaikan oleh fasilitator, sehingga seluruh peserta memperoleh pemahaman yang sama dan tidak ada informasi yang terlewat. Selain itu, praktikan juga kembali memaparkan konsep mengenai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai landasan bagi warga dalam mengidentifikasi persoalan sosial yang ada di lingkungan mereka. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengenali masalah, potensi, dan peluang intervensi yang relevan untuk peningkatan kesejahteraan sosial di Desa Sitisari. Hasil dari rebug warga ini menghasilkan 7 persoalan di Desa Sitisari yang diantaranya termasuk ke dalam kategori 12-PAS, dirincikan sebagai berikut:

- 1) Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)
- 2) Fakir Miskin
- 3) Disabilitas
- 4) Anak Putus Sekolah
- 5) Anak Stunting
- 6) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
- 7) Korban Bencana



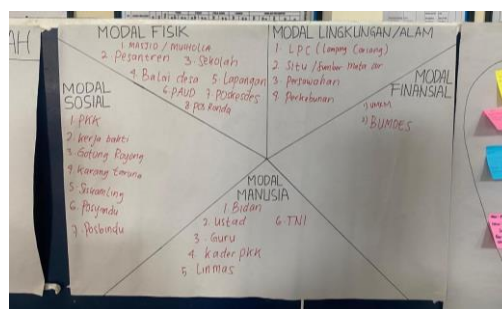
Gambar.4. 2.Hasil MPA

4. Sustainable Livelihood Asset (SLA)

Sustainable Livelihood Asset adalah kerangka kerja yang berfokus pada lima jenis modal (manusia, alam, sosial, fisik, finansial) sebagai fondasi untuk memahami dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu bertahan hidup, mengatasi kerentanan, dan mencapai kesejahteraan secara mandiri dan berjangka panjang, bukan hanya sekadar bantuan instan. Pendekatan ini dipakai

pekerja sosial untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki komunitas dan membangun strategi program yang memberdayakan partisipasi aktif masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan SLA dilakukan pada hari yang sama dengan kegiatan rembug warga atau *community meeting*, yang di dalamnya mencakup penggunaan teknik MPA. Kegiatan SLA ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi berbagai sumber daya, aset, modal, maupun potensi yang dimiliki Desa Sitisari sebagai dasar dalam merumuskan program pemberdayaan yang tepat sasaran. Pelaksanaannya, praktikan berperan sebagai pendamping warga, membantu peserta memahami setiap komponen yang harus diisi dalam kolom aset atau modal. Praktikan menjelaskan secara rinci jenis-jenis modal yang terdapat dalam teknik SLA, mulai dari modal fisik, finansial, lingkungan, teknologi, manusia, sosial, hingga spiritual. Melalui penjelasan tersebut, diharapkan warga mampu mengenali kekuatan dan potensi desanya secara lebih komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.



Gambar.4. 3. Hasil SLA

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi berbagai aset atau modal yang dimiliki Desa Sitisari. Warga terlibat aktif dalam mengisi kategori-kategori aset yang tersedia, mencakup modal fisik, finansial, lingkungan, teknologi, manusia, sosial, hingga spiritual. Melalui proses ini, praktikan tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi desa, tetapi juga dapat mencocokkan aset-aset tersebut dengan kebutuhan program yang akan diintervensikan pada tahap berikutnya. Informasi yang terkumpul menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana intervensi yang relevan, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Adapun rincian hasil penggalian sumber daya oleh masyarakat Desa Sitisari adalah sebagai berikut:

Matriks.4. 1.Hasil SLA

Modal Fisik	Modal Finansial	Modal Lingkungan	Modal Manusia	Modal Sosial
<ul style="list-style-type: none"> - Masjid - Pesantren - Sekolah SD - Balai Desa - Lapangan - PAUD - Poskesdes - Pos Ronda 	<ul style="list-style-type: none"> - UMKM - BUMDES 	<ul style="list-style-type: none"> - Situ (Mata Air) - Persawahan - Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidan - Ustad - Guru - Kader PKK - Linmas - TNI - Karang Taruna - Ketua RT 	<ul style="list-style-type: none"> - PKK - Kerja Bakti - Gotong Royong - Karang Taruna - Siskamling - Posyandu - Posbindu

5. Janji Hati

Teknik ini bertujuan untuk membuat komitmen antara praktikan dengan peserta yang hadir, kegiatan pengisian janji hati ini sama juga dilakukan ketika kegiatan rebug warga atau *community meeting*. Namun, praktikan melakukan dua kali pelaksanaan janji hati ini yaitu setelah kegiatan MPA dan SLA berlangsung serta pada tahapan rencana intervensi (ToP).



Gambar.4. 4.Janji Hati

6. Assesmen Lanjutan

Praktikan melakukan asesmen lanjutan untuk menggali permasalahan NAPZA di desa situsari. Praktikan berkunjung ke balai desa untuk mencari informasi mengenai korban NAPZA kepada perangkat desa, hasil informasi yang praktikan dapat terdapat korban penyalahgunaan NAPZA di desa situsari berjumlah 2 orang. Satu korban penyalahgunaan NAPZA terdapat di RT 1 dan RT 2 rincian asesmen lanjutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Assesmen pada Perangkat Desa Situsari

Pelaksanaan asesmen lanjutan yang dilakukan oleh praktikan kepada perangkat desa terkait korban penyalahgunaan NAPZA merupakan tahapan

penting dalam rangka pendalaman data dan pemetaan permasalahan sosial di tingkat komunitas. Asesmen lanjutan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan terperinci mengenai keberadaan, kondisi, serta kebutuhan korban penyalahgunaan NAPZA di wilayah Desa Sitisari, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan intervensi yang tepat dan berkelanjutan.

Asesmen lanjutan dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi terarah dengan perangkat desa yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kondisi sosial masyarakat, khususnya Ketua RT dan aparatur desa terkait. Praktikan melakukan penggalian informasi secara sistematis melalui diskusi dan wawancara mendalam, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip profesional pekerjaan sosial, seperti kerahasiaan, objektivitas, serta penghormatan terhadap martabat individu. Fokus asesmen diarahkan pada identifikasi jumlah korban, lokasi tempat tinggal, karakteristik umum permasalahan, serta bentuk dukungan yang telah atau belum diterima oleh korban di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil asesmen lanjutan yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa terdapat dua orang korban penyalahgunaan NAPZA yang berada di wilayah Desa Sitisari, masing-masing berdomisili di RT 01 dan RT 02. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan NAPZA telah menyentuh lingkup masyarakat di tingkat rukun tetangga, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan yang terkoordinasi. Hasil asesmen ini selanjutnya menjadi dasar bagi praktikan dan perangkat desa untuk merumuskan langkah tindak lanjut, baik dalam bentuk upaya pencegahan, pendampingan, maupun rujukan kepada lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi korban.



Foto 4. 2 Asesmen Lanjutan Pada Perangkat Desa

2. *Home Visit* pada Keluarga Korban Penyalahgunaan Napza

Pelaksanaan asesmen lanjutan dilakukan melalui komunikasi dan wawancara terarah dengan anggota keluarga korban, khususnya orang tua atau wali, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, persetujuan,

dan penghormatan terhadap martabat keluarga. Praktikan menggali informasi secara sistematis mengenai latar belakang penggunaan NAPZA, usia awal penggunaan, faktor pemicu, serta respons keluarga terhadap permasalahan yang dialami oleh korban. Selain itu, asesmen juga mencakup pemetaan peran dan fungsi keluarga, pola relasi antaranggota keluarga, serta kesiapan keluarga dalam mendukung proses pendampingan dan pemulihan korban.

Berdasarkan hasil asesmen lanjutan yang dilakukan, keluarga korban memvalidasi bahwa anak mereka pernah menjadi pengguna NAPZA. Keluarga menyampaikan bahwa korban mulai menggunakan NAPZA pada usia 17 tahun, yang termasuk dalam kategori usia remaja. Temuan ini menunjukkan bahwa korban berada pada fase perkembangan yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan perilaku berisiko. Selain itu, keluarga menyadari bahwa keterlibatan korban dalam penyalahgunaan NAPZA memberikan dampak psikologis dan sosial, baik bagi korban maupun bagi dinamika keluarga secara keseluruhan.

Hasil asesmen ini menegaskan pentingnya keterlibatan keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam upaya pencegahan kekambuhan dan pemulihan korban. Informasi yang diperoleh menjadi dasar bagi praktikan dalam merumuskan rencana intervensi yang berfokus pada penguatan fungsi keluarga, peningkatan pemahaman orang tua mengenai perkembangan remaja, serta pengembangan strategi pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban penyalahgunaan NAPZA.



Foto 4. 3. Asesmen pada Keluarga Korban Penyalahgunaan NAPZA

3. Asesmen pada Kader PKK

Asesmen lanjutan yang dilakukan praktikan kepada kader PKK terkait korban penyalahgunaan NAPZA merupakan upaya pendalaman informasi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial masyarakat serta kebutuhan penanganan yang diperlukan. Dalam proses

asesmen, praktikan melakukan diskusi dan wawancara terarah dengan kader PKK sebagai pihak yang memiliki kedekatan dan pengetahuan mengenai dinamika keluarga dan lingkungan masyarakat. Asesmen difokuskan pada identifikasi keberadaan korban penyalahgunaan NAPZA, bentuk permasalahan yang muncul, kebutuhan korban dan keluarga, serta potensi dukungan yang dapat diberikan oleh kader PKK dan kelembagaan desa.

Hasil asesmen menunjukkan bahwa korban penyalahgunaan NAPZA memerlukan dukungan yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga pendampingan psikososial, penguatan peran keluarga, serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai pencegahan NAPZA. Selain itu, kader PKK mengidentifikasi kebutuhan akan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembekalan agar mampu berperan lebih aktif dalam deteksi dini, pendampingan keluarga, dan rujukan kepada layanan terkait. Temuan ini menjadi dasar bagi praktikan dalam merumuskan rekomendasi intervensi yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas guna mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tingkat desa.



Foto 4. 4. Asesmen pada Kader PKK

4.2.2 Hasil Praktik Tahapan Asesmen

Hasil dari asesmen lanjutan yang telah dilakukan praktikan menunjukkan bahwa permasalahan penyalahgunaan NAPZA di Desa Sitisari merupakan isu yang nyata dan memerlukan penanganan secara komprehensif serta terkoordinasi. Hasil asesmen dengan perangkat desa mengidentifikasi adanya dua orang korban penyalahgunaan NAPZA yang berada di wilayah RT 01 dan RT 02, sehingga menegaskan bahwa permasalahan tersebut telah menjangkau lingkup komunitas terkecil dan membutuhkan perhatian bersama.

Asesmen lanjutan pada keluarga korban memvalidasi riwayat penyalahgunaan NAPZA, di mana korban mulai menggunakan NAPZA pada usia 17 tahun dan termasuk dalam kategori remaja. Temuan ini menunjukkan adanya

kerentanan pada fase perkembangan remaja serta pentingnya peran keluarga sebagai sistem pendukung utama dalam proses pencegahan kekambuhan dan pemulihan korban. Keluarga pada umumnya memiliki keinginan untuk mendukung pemulihan korban, namun masih memerlukan penguatan pengetahuan, pendampingan, dan akses terhadap layanan yang sesuai.

Sementara itu, hasil asesmen dengan kader PKK menunjukkan bahwa kader memiliki potensi strategis sebagai agen pencegahan di tingkat komunitas, namun masih membutuhkan peningkatan kapasitas, pembekalan, dan dukungan kelembagaan. Kebutuhan utama yang teridentifikasi meliputi edukasi berkelanjutan mengenai NAPZA, pendampingan psikososial bagi korban dan keluarga, serta penguatan jejaring rujukan dengan lembaga terkait. Secara keseluruhan, hasil asesmen lanjutan ini menegaskan pentingnya sinergi antara perangkat desa, keluarga, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA secara partisipatif dan berkelanjutan di Desa Sitisari.

4.3 Tahap Rencana Intervensi (Discovery)

4.3.1 Proses Rencana Intervensi

Tahap perencanaan intervensi, setiap praktikan telah menetapkan fokus permasalahan masing-masing berdasarkan hasil Metode Asesmen Partisipatif (MAP). Terdapat tujuh fokus utama yang diprioritaskan, yaitu korban penyalahgunaan NAPZA, Korban Bencana, Disabilitas, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE), Fakir Miskin, Anak Putus Sekolah, dan Anak Stunting. Penetapan fokus ini didasarkan pada tingkat urgensi serta relevansinya dengan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah intervensi, sehingga fokus tersebut dapat disebut sebagai prioritas masalah. Setelah menentukan fokus pada isu penyalahgunaan NAPZA, praktikan kemudian melaksanakan kegiatan *Technology of Participation* (ToP). Sebelum kegiatan ToP dilakukan, praktikan terlebih dahulu berkoordinasi dan bertemu dengan para *stakeholder* yang memiliki ketertarikan, kepedulian, atau keterlibatan langsung terhadap isu penyalahgunaan NAPZA (*interest group*), kemudian mengundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan rencana intervensi. Pelaksanaan ToP bertujuan untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran, partisipatif, serta berkelanjutan, sehingga strategi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Sitisari.



Foto 4. 5.Rencana Intervensi dengan Teknik TOP

Praktikan melaksanakan kegiatan rencana intervensi pada tanggal 15 November 2025 yang bertempat di Posko Praktikum Komunitas. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat, perangkat desa, serta *interest group* yang sebelumnya telah diidentifikasi dan diundang untuk terlibat dalam proses perencanaan. Dalam pelaksanaannya, praktikan memaparkan tujuan serta tahapan kegiatan *Technology of Participation* (ToP), sehingga seluruh peserta memahami alur dan mekanisme yang akan dijalankan. Selanjutnya, forum digunakan untuk membahas secara rinci rancangan program yang akan dilaksanakan, mulai dari penentuan jenis kegiatan, sasaran utama, waktu serta lokasi pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Melalui proses ini, praktikan memastikan bahwa rencana intervensi yang disusun bersifat partisipatif, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memungkinkan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.

4.3.2 Hasil Rencana Intervensi

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ToP menunjukkan adanya partisipasi aktif dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Desa Situsari. Salah satu usulan utama yang muncul adalah pembentukan Tim Relawan Satuan Tugas Anti NAPZA sebagai langkah konkret dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan desa. Masyarakat bersama praktikan kemudian menyusun rencana kegiatan serta menetapkan struktur kepengurusan tim berdasarkan hasil diskusi yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Dalam proses pemilihan, Bapak Lukman ditetapkan sebagai Ketua Tim Relawan Satuan Tugas Anti NAPZA Tingkat Desa Situsari dan Bapak Endin selaku Kepala Desa Situsari dipercaya sebagai Penanggung Jawab. Selain itu, melalui kegiatan ToP ini, praktikan dan masyarakat berhasil merumuskan berbagai rencana tindak lanjut yang diarahkan untuk memberdayakan warga dalam melakukan tindakan preventif terhadap penyalahgunaan NAPZA. Adapun struktur TKM Tim Relawan

Satuan Tugas Anti NAPZA Tingkat Desa Situsari yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

Tabel.4. 1. Struktur Tim Kerja Masyarakat Satgas Anti-NAPZA

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat
1.	Endin	L	Penanggung Jawab	Situsari
2.	Lukman	L	Ketua	Situsari
3.	Rudiyanto	L	Sekretaris	Situsari
4.	Antini Arvianita	P	Anggota	Situsari
5.	Bunga	P	Anggota	Situsari
6.	Saroh	P	Anggota	Situsari
7.	Rindi	P	Anggota	Situsari
8.	Putri	P	Anggota	Situsari

Beberapa program yang telah dirancang mencakup rencana jangka pendek maupun jangka panjang, dengan fokus utama pada upaya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA. Lukman, selaku Ketua Tim Relawan Satuan Tugas Anti NAPZA, bertanggung jawab dalam memimpin koordinasi serta mengawasi keseluruhan pelaksanaan program agar berjalan efektif dan sesuai tujuan. Sementara itu, Kamila Rudi sebagai Sekretaris memiliki peran dalam mengatur jadwal kegiatan, menyiapkan administrasi, serta melakukan pendokumentasian setiap aktivitas tim. Melalui pembagian tugas yang jelas ini, diharapkan program-program yang dirumuskan dapat terlaksana secara terstruktur, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Situsari.

Program jangka panjang, Tim Relawan Satuan Tugas Anti NAPZA akan berfokus pada keberlanjutan kegiatan serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA. Ketua tim berperan memberikan arahan strategis untuk pengembangan program, termasuk menyiapkan langkah-langkah pendampingan bagi korban penyalahgunaan NAPZA agar dapat memperoleh akses layanan rehabilitasi yang sesuai. Dalam hal ini, diperlukan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuningan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mendukung proses rehabilitasi. Selain itu, tim juga akan memperkuat edukasi preventif, memperluas jejaring kemitraan, serta memastikan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Dengan pembagian peran yang jelas dan program kerja yang terstruktur, Tim Satuan Tugas Anti NAPZA di Desa Situsari diharapkan mampu menciptakan

Desa Genza (Generasi anti-NAPZA). Seluruh perancangan program tersebut merupakan hasil pengembangan dari program sebelumnya yang sudah ditentukan ketika pelaksanaan ToP, sebagai berikut:

1. Penyuluhan Tingkat Desa Sitisari kepada Masyarakat dan Remaja.
2. Pembentukan Satgas anti-NAPZA
3. Kerjasama dengan Polsek Darma dan BNN Kabupaten Kuningan
4. Monitoring

4.4 Tahap Intervensi (*Development*)

Menindaklanjuti rencana intervensi yang sudah dilakukan pada kegiatan ToP maka praktikan melaksanakan berbagai intervensi yang secara besarnya membentuk Tim Relawan/Satuan Tugas Anti NAPZA Tingkat Desa Sitisari, berikut merupakan rincian kegiatan intervensinya:

1. Penyuluhan pada Masyarakat Desa Sitisari

Penyuluhan mengenai pencegahan penyalahgunaan NAPZA, penanganan korban penyalahgunaan NAPZA, serta isu *bullying* dan kenakalan remaja dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025 di Balai Desa Sitisari. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kepolisian Sektor Darma yang memberikan pemaparan komprehensif terkait dampak, faktor risiko, serta strategi pencegahan berbagai permasalahan sosial tersebut.



Foto 4. 6. Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA

Penyuluhan dihadiri oleh 25 peserta yang terdiri dari remaja, perangkat desa, Ketua Karang Taruna, dan perwakilan PKK. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya deteksi dini, pendampingan korban, serta upaya menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi remaja. Kehadiran narasumber dari pihak kepolisian juga memberikan perspektif hukum dan langkah-langkah penanganan yang tepat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif

masyarakat dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan NAPZA, *bullying*, dan perilaku kenakalan remaja di Desa Sitisari.

2. Membentuk Struktur Kepengurusan Satgas anti-NAPZA

Pelaksanaan kegiatan ini, praktikan menyusun dan memfasilitasi pembentukan struktur kepengurusan yang akan menjadi wadah resmi dalam upaya pencegahan serta pengurangan penyalahgunaan NAPZA di tingkat Desa Sitisari. Kegiatan dilaksanakan di balai desa, dan dihadiri oleh anggota Tim Kelompok Masyarakat (TKM). Sebagai fasilitator, praktikan memberikan arahan dan panduan kepada TKM untuk menyusun struktur organisasi berdasarkan contoh Surat Keputusan (SK) yang telah disediakan oleh BNNK Kuningan. Melalui proses diskusi dan musyawarah, setiap anggota memilih peran sesuai minat dan kapasitasnya masing-masing. Hasilnya, terbentuklah kepengurusan yang lengkap dan representatif, yang diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Desa Sitisari.



Foto 4. 7. Pembentukan Satgas Anti NAPZA

3. Kerjasama dengan kepolisian

Pelaksanaan kerja sama dengan Kepolisian Sektor Darma menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di masyarakat Desa Sitisari. Kolaborasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen dan diskusi bersama masyarakat yang menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan edukasi serta tindakan preventif terkait penyalahgunaan NAPZA.

Kerja sama dengan Polsek Darma dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Polsek Darma berperan dalam memberikan dukungan berupa penyuluhan hukum terkait tindak pidana NAPZA, pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pemantauan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat

(kamtibmas) yang berkaitan dengan potensi peredaran maupun penggunaan NAPZA di wilayah Desa Sitisari.

Pelaksanaannya, praktikan berperan sebagai penghubung dan fasilitator antara masyarakat, perangkat desa, dan pihak kepolisian, sehingga setiap kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran Polsek Darma dalam kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum penyalahgunaan NAPZA, tetapi juga memperkuat kapasitas warga dalam melakukan deteksi dini serta upaya pencegahan secara partisipatif. Kerja sama ini secara resmi dilakukan pada tanggal 24 November 2025 di Kantor Polsek Darma dan diterima langsung oleh Kapolsek Darma. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan dapat terbangun lingkungan desa yang lebih aman, kondusif, dan sehat, serta terwujudnya komitmen bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA secara berkelanjutan.



Foto 4. 8. Kerjasama dengan Polsek Darma

4. Kerjasama dengan BNNK Kuningan

Praktikan menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuningan sebagai upaya untuk menangani korban penyalahgunaan NAPZA di Desa Sitisari, khususnya dalam menyediakan akses layanan rehabilitasi yang sesuai kebutuhan. Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 26 November 2025, praktikan melakukan koordinasi langsung dengan pihak BNNK untuk menyampaikan kondisi dan data awal mengenai individu yang teridentifikasi membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Kerja sama tersebut mencakup pemahaman alur rujukan rehabilitasi, persiapan administrasi, serta langkah pendampingan bagi korban agar dapat mengikuti proses rehabilitasi dengan aman dan tepat sasaran. Melalui kolaborasi ini, diharapkan masyarakat Desa Sitisari dapat memperoleh layanan rehabilitasi

yang komprehensif, serta terbentuk mekanisme penanganan yang lebih terstruktur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di tingkat desa.



Foto 4. 9. Kerjasama dengan BNN Kabupaten Kuningan

4.5 Tahap Evaluasi (*Development*)

4.5.1 Evaluasi Proses

Pembentukan Tim Relawan/Satuan Tugas Anti NAPZA Tingkat Desa Sitisari telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan rencana intervensi yang telah disusun. Proses pembentukan dimulai dari upaya praktikan dalam mengidentifikasi serta menghubungkan calon Tenaga Kerja Masyarakat (TKM) dari berbagai latar belakang yang menunjukkan ketertarikan terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Selanjutnya, muncul usulan dari masyarakat untuk membentuk Satgas Anti NAPZA sebagai wadah resmi bagi warga dalam melakukan tindakan preventif. Menindaklanjuti usulan tersebut, praktikan kemudian memfasilitasi proses pembekalan bagi TKM, yang mencakup peningkatan pemahaman mengenai bahaya NAPZA serta strategi pencegahannya. Setelah pembekalan, dilakukan pula aksi langsung di lapangan oleh TKM, antara lain penyuluhan kepada masyarakat, kegiatan kolaborasi dengan Kepolisian Sektor Darma, serta koordinasi dengan BNNK Kuningan. Secara keseluruhan, pelaksanaan intervensi berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan, serta mendapat dukungan yang baik dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.

4.5.2 Evaluasi Hasil

Kegiatan intervensi ini bersifat pemberdayaan masyarakat, yang diwujudkan melalui pembentukan Tim Relawan atau Satuan Tugas Anti NAPZA Tingkat Desa Sitisari. Pelaksanaannya diawali dengan proses dialog antara praktikan dan masyarakat sebagai langkah membangun hubungan yang kuat serta menciptakan kepercayaan. Selanjutnya, praktikan melakukan tahap discovery

untuk menggali persoalan, potensi, dan kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam melalui berbagai teknik asesmen partisipatif. Proses tersebut kemudian dilanjutkan pada tahap development, yaitu mengembangkan rencana aksi bersama masyarakat untuk merumuskan strategi pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Pembentukan program dan tujuan kegiatan ini disusun berdasarkan hasil MPA/MAP (Metode Asesmen Partisipatif), sehingga setiap langkah intervensi yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi, prioritas kebutuhan, dan aspirasi masyarakat Desa Sitisari. Dengan demikian, keberadaan Tim Relawan Anti NAPZA tidak hanya menjadi bentuk intervensi, tetapi juga wadah pemberdayaan yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA.

Pembentukan Tim Relawan/Satuan Tugas Anti NAPZA di Desa Sitisari memiliki tujuan utama sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran NAPZA melalui kegiatan edukasi, penguatan dukungan pengawasan lingkungan, serta pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya NAPZA kepada masyarakat, khususnya kelompok remaja sebagai generasi penerus. Tim ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas dari pengaruh buruk NAPZA. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah tercapai secara bertahap dan sesuai dengan perencanaan. Hal ini terlihat dari rangkaian proses yang dilakukan, mulai dari tahapan awal Metode Partisipatif Masyarakat (MPA/MAP), kegiatan *Technology of Participation* (ToP), hingga pelaksanaan intervensi melalui pembentukan Satuan Tugas Anti NAPZA, penyuluhan kepada masyarakat, serta terjalinnya kerja sama dengan Kepolisian Sektor Darma dan BNNK Kuningan. Seluruh rangkaian kegiatan menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi turut berperan aktif sebagai subjek upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Desa Sitisari. Form Evaluasi Terlampir.

4.6 Tahap Terminasi dan Rujukan (*Continuity*)

4.6.1 Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan akhir dalam rangkaian proses intervensi yang dilaksanakan oleh praktikan selama Praktikum Komunitas di Desa Sitisari. Tahapan ini tidak dimaknai sebagai penghentian hubungan maupun intervensi secara total, melainkan sebagai proses penegasan dan penguatan terhadap perubahan positif yang telah dicapai bersama masyarakat agar dapat

dipahami, dijaga, serta dilanjutkan secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan demikian, tahap terminasi menjadi momentum penting untuk memastikan keberlanjutan program dan kemandirian komunitas setelah berakhirnya peran langsung praktikan.

Tahap terminasi yang dilakukan oleh praktikan diwujudkan melalui kegiatan pelantikan Satgas Anti-NAPZA sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah desa. Penyerahan SK tersebut menjadi bentuk legalisasi dan pengakuan formal terhadap keberadaan serta peran Satgas Anti-NAPZA di Desa Situsari. Melalui pelantikan ini, anggota satgas diharapkan memiliki legitimasi, rasa tanggung jawab, dan komitmen yang lebih kuat dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan masyarakat.

Kegiatan terminasi ini menandai peralihan peran dari praktikan kepada masyarakat dan kelembagaan desa, khususnya Satgas Anti-NAPZA, sebagai pihak yang akan melanjutkan program secara berkesinambungan. Dengan adanya dukungan regulasi desa dan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Desa Situsari dapat terus berjalan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis partisipasi masyarakat, meskipun kegiatan praktikum komunitas telah berakhir.

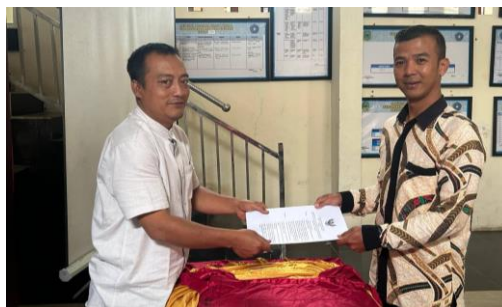


Foto 4. 10. Penyerahan SK dan Terminasi

4.6.2 Rujukan

Tahap rujukan ini, praktikan memastikan bahwa seluruh hasil intervensi - mulai dari pembentukan Satuan Tugas Anti NAPZA, pelaksanaan penyuluhan, hingga kemitraan dengan kepolisian dan BNNK Kuningan - dapat diteruskan oleh pihak desa dan masyarakat. Selain itu, tahap rujukan dilakukan untuk mengarahkan masyarakat, khususnya kelompok sasaran seperti korban penyalahgunaan NAPZA, kepada lembaga atau instansi yang berwenang agar mereka memperoleh layanan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Dengan

demikian, tahap terminasi dan rujukan berfungsi untuk memastikan keberlanjutan program serta memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga lingkungan Desa Sitisari tetap aman dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA. Satgas Anti NAPZA diharapkan dapat terus melanjutkan program pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA di desa Sitisari, praktikan merincikan rujukan sebagai berikut:

1. Pihak Desa Sitisari melakukan monitoring terhadap Satgas anti-NAPZA agar program terus berjalan sebagai Upaya pencegahan dan penanganan korban penyalahgunaan NAPZA.
2. Merujuk pada pihak BNNK untuk dilakukan bimbingan pada Satgas anti-NAPZA dan pelaksanaan lokakarya.
3. Menyerahkan tanggungjawab keberlangsungan dan keberhasilan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada TKM/Satgas anti-NAPZA.

BAB V

PRAKTIK BAIK PRAKTIKUM KOMUNITAS

5.1 Integrasi/Keterkaitan/ Saling Melengkapi Metode *Community Work* dan *Group Work* serta Capaian terbaik dari Praktikum Komunitas.

Desa Situsari merupakan lokasi pelaksanaan Praktikum Komunitas yang menjadi wahana bagi praktikan untuk memperoleh pengalaman langsung dalam mengintegrasikan penerapan metode *community work* dan *group work*. Selama proses praktikum berlangsung, praktikan terlibat secara aktif dalam dinamika kehidupan masyarakat, baik pada tingkat komunitas maupun kelompok, sehingga memungkinkan penerapan kedua metode tersebut secara berkesinambungan.

Pelaksanaan metode *community work* difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan partisipasi, kesadaran, dan kemandirian komunitas dalam mengidentifikasi serta menangani permasalahan sosial yang dihadapi. Sementara itu, metode *group work* diterapkan sebagai strategi pendukung untuk mengoptimalkan peran kelompok-kelompok masyarakat sebagai agen perubahan sosial. Berdasarkan hasil pelaksanaan praktikum, praktikan menemukan bahwa penerapan metode *community work* dan *group work* memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pendekatan komunitas memberikan kerangka kerja makro dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan pendekatan kelompok berperan sebagai sarana operasional yang efektif dalam mengorganisasi, memfasilitasi, dan mengembangkan potensi anggota masyarakat. Sinergi kedua metode tersebut berkontribusi secara signifikan dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan di Desa Situsari.

Metode *community work* menitikberatkan pada pendekatan makro yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui proses pembangunan relasi, pengorganisasian komunitas, perencanaan, serta pelaksanaan intervensi yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Dalam penerapannya, praktikan berupaya melibatkan berbagai unsur yang ada di lingkungan setempat, mulai dari kelompok remaja, tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya, guna menciptakan dukungan bersama dalam upaya penanganan permasalahan sosial yang dihadapi komunitas.

Praktikan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan rembug warga atau *community meeting* sebagai media partisipatif untuk mengidentifikasi, menggali,

dan menganalisis potensi, sumber daya, serta permasalahan yang terdapat di lingkungan Desa Situsari. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat secara inklusif, sehingga proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara kolektif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi warga setempat.

Metode *group work* diterapkan melalui pendekatan mikro yang berfokus pada upaya pemberdayaan serta peningkatan kapasitas individu dan kelompok melalui pemanfaatan dinamika kelompok. Pelaksanaannya, praktikan membentuk Tim Relawan atau Satuan Tugas Anti NAPZA yang terdiri atas perwakilan remaja dan perangkat desa sebagai aktor utama dalam kegiatan pencegahan. Pembentukan tim tersebut diikuti dengan pelaksanaan serangkaian kegiatan pelatihan dan pembekalan, antara lain penyampaian materi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), serta penguatan keterampilan dalam metode penyuluhan. Proses pembinaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi individu anggota tim, tetapi juga untuk memperkuat kohesi, kerja sama, dan efektivitas kelompok dalam melaksanakan tugas secara kolektif. Tim relawan mampu berfungsi sebagai satu kesatuan yang solid dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di masyarakat.

Keterpaduan antara penerapan metode *community work* dan *group work* tercermin secara nyata dalam upaya mewujudkan Generasi anti-NAPZA (GENZA) di Desa Situsari. Melalui pendekatan *community work*, Satuan Tugas Anti NAPZA memperoleh dukungan yang luas dari masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi, legitimasi sosial, maupun kolaborasi lintas unsur. Sementara itu, melalui pendekatan *group work*, tim relawan berhasil mengimplementasikan program edukasi dan penyuluhan di lingkungan sekolah dengan menyampaikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA serta strategi pencegahannya.

Capaian utama dari pelaksanaan program tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA. Hal ini tercermin dari pemahaman masyarakat yang semakin baik mengenai risiko dan dampak negatif NAPZA, serta tumbuhnya sikap waspada dan komitmen kolektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan NAPZA.

5.1.1 Capaian Terbaik Praktikum Komunitas

Capaian terbaik dalam melakukan Praktikum Komunitas di Desa Situsari.

1. Peningkatan keterampilan praktik intervensi pada aras makro
Peningkatan keterampilan praktik intervensi pada aras makro tercermin dari kemampuan praktikan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur komunitas. Aras makro, praktikan mampu melakukan analisis situasi sosial, mengidentifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat, serta mengoordinasikan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Keterampilan tersebut menunjukkan penguasaan pendekatan makro yang menekankan pada pengorganisasian masyarakat, penguatan jejaring kerja, dan pengambilan keputusan secara partisipatif guna mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.
2. Pengetahuan baru mengenai komunitas
Pengetahuan baru mengenai komunitas diperoleh melalui keterlibatan langsung praktikan dalam proses interaksi sosial, observasi lapangan, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat. Melalui pengalaman tersebut, praktikan memahami karakteristik sosial, budaya, struktur kelembagaan, pola relasi antarwarga, serta dinamika permasalahan dan potensi yang dimiliki komunitas. Pengetahuan ini menjadi landasan penting dalam merancang dan melaksanakan intervensi yang kontekstual, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan nilai dan norma yang berkembang di dalam komunitas.

5.2 Refleksi Praktikan

1. Refleksi Praktikan

Berikut merupakan Refleksi Praktikan dalam melakukan Praktikum Komunitas sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran Membangun Relasi
Praktikan memperoleh pembelajaran mengenai pentingnya membangun relasi dan kepercayaan dengan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan intervensi komunitas, yang memerlukan sikap terbuka, empati, serta penghormatan terhadap nilai dan norma lokal.
- 2) Dinamika Permasalahan Sosial
Praktikan menghadapi dinamika dan kompleksitas permasalahan sosial di tingkat komunitas, sehingga menuntut kemampuan analisis sosial yang

komprehensif dalam mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan sumber daya yang tersedia di masyarakat.

3) Kolaborasi dengan berbagai Pihak

Praktikan memperoleh pengalaman dalam menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, perangkat desa, remaja, serta stakeholder terkait, sebagai bagian dari upaya kolaboratif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

4) Penerapan metode

Praktikan merefleksikan penerapan metode *community work* dan *group work* membutuhkan kesabaran, konsistensi, serta kemampuan mengelola dinamika kelompok dan perbedaan kepentingan dalam masyarakat.

2. Dilema Etik

Berikut merupakan Dilema Etik yang dialami oleh Praktikan dalam melakukan Praktikum Komunitas.

- 1) Praktikan berada pada posisi dilematis ketika harus bersikap netral di tengah perbedaan pendapat atau konflik kepentingan antarwarga, sementara di sisi lain dituntut untuk tetap mendorong tercapainya kesepakatan dan keberlangsungan kegiatan komunitas. Solusi yang dapat dilakukan praktikan adalah dengan menjalankan peran sebagai fasilitator yang netral, memberikan ruang yang seimbang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan pendapat, serta mengarahkan proses musyawarah pada tujuan bersama komunitas. Praktikan tetap berpegang pada kode etik pekerjaan sosial dan, apabila diperlukan, melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk menjaga objektivitas dan keberlangsungan kegiatan.
- 2) Praktikan mengalami dilema dalam menentukan batas peran profesional, khususnya ketika masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap bantuan atau intervensi di luar kapasitas dan kewenangan praktikan sebagai mahasiswa praktikum. Solusi atas dilema etik tersebut adalah dengan menetapkan dan mengomunikasikan batas peran profesional secara jelas kepada masyarakat sejak awal, sesuai dengan kapasitas dan kewenangan praktikan sebagai mahasiswa praktikum. Praktikan perlu bersikap jujur dan transparan mengenai keterbatasan yang dimiliki, serta mengarahkan harapan masyarakat melalui pemberian informasi dan

rujukan kepada pihak atau lembaga yang berwenang agar kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani secara tepat dan etis.

- 3) Praktikan dihadapkan pada situasi ketika partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sukarela, sehingga menimbulkan pertimbangan etik terkait pelaksanaan kegiatan yang tetap menghargai prinsip kesadaran, persetujuan, dan partisipasi aktif masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan praktikan adalah dengan memperkuat pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat, menjelaskan tujuan, manfaat, dan proses kegiatan secara terbuka, serta memastikan bahwa partisipasi didasarkan pada kesadaran dan persetujuan tanpa paksaan. Praktikan perlu menghormati keputusan masyarakat yang memilih untuk tidak terlibat dan mendorong partisipasi aktif secara bertahap sesuai dengan kesiapan warga.

Dilema etik merupakan kondisi yang sering dihadapi dalam praktik pekerjaan sosial, termasuk oleh praktikan selama melaksanakan Praktikum Komunitas. Melalui pengalaman tersebut, praktikan menyadari bahwa penanganan dilema etik tidak cukup hanya dengan berfokus pada permasalahan yang sedang dihadapi secara situasional. Lebih dari itu, setiap dilema etik menjadi sarana pembelajaran yang penting untuk memperdalam pemahaman terhadap prinsip, nilai, dan kode etik pekerjaan sosial.

Praktikan belajar untuk melakukan refleksi kritis, mempertimbangkan berbagai alternatif tindakan, serta menimbang konsekuensi etis dari setiap keputusan yang diambil. Proses ini membantu praktikan dalam membangun kepekaan etik dan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pengalaman menghadapi dilema etik tidak hanya berfungsi sebagai tantangan, tetapi juga sebagai bekal profesional yang memungkinkan praktikan untuk lebih siap dan bijaksana dalam menangani permasalahan serupa di masa yang akan datang.

5.3 Keterlibatan Praktikan dalam Kegiatan di Desa Sitisari

Selama melaksanakan praktikum komunitas, selain bertanggungjawab menjalankan intervensi dalam aras makro praktikan juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan lain di desa Sitisari sebagai wujud dari pengabdian masyarakat:

1. Senam di Kecamatan Darma

Pelaksanaan kegiatan senam rutin setiap hari Jumat di Kecamatan Darma merupakan salah satu bentuk kegiatan bersama yang bertujuan untuk

meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus mempererat interaksi sosial antar peserta. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Darma dan diikuti oleh Ibu Sekretaris Kecamatan, mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan lapangan, serta mahasiswa dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Darma.

Keterlibatan Ibu Sekretaris Kecamatan dalam kegiatan senam bersama memberikan dukungan moril serta mencerminkan komitmen aparatur kecamatan dalam mendorong pola hidup sehat dan kebersamaan. Sementara itu, partisipasi mahasiswa dari berbagai desa menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi, solidaritas, dan jejaring antarmahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian di masing-masing wilayah. Selain berfungsi sebagai aktivitas fisik, kegiatan senam ini juga menjadi media informal untuk membangun komunikasi, berbagi pengalaman lapangan, serta memperkuat kerja sama lintas desa dalam suasana yang positif dan kondusif.



Foto 5. 1. Senam di Kecamatan Darma

2. Wakaf Al-Qur'an

Penyaluran wakaf Al-Qur'an dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masing-masing pesantren sebagai penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, praktikan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan identifikasi kebutuhan bersama pihak pesantren agar jumlah serta kondisi Al-Qur'an yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan santri dalam kegiatan pembelajaran dan ibadah sehari-hari. Melalui kegiatan ini, praktikan berupaya berkontribusi dalam memperluas akses terhadap Al-Qur'an sebagai sumber utama pembelajaran agama Islam, sekaligus mendorong peningkatan minat santri dalam membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an secara berkelanjutan.

Selain memberikan manfaat langsung bagi santri dan pengelola pesantren dalam menunjang proses pendidikan keagamaan, kegiatan wakaf Al-Qur'an ini

juga menjadi media pembelajaran sosial bagi praktikan. Praktikan memperoleh pengalaman dalam menumbuhkan nilai kepedulian sosial, tanggung jawab moral, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini sekaligus memperkuat pemahaman praktikan mengenai pentingnya peran partisipasi sosial dan keagamaan dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan kebersamaan.



Foto 5. 2. Wakaf Al-Qur'an

3. Senam dengan Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Keikutsertaan praktikan dalam kegiatan senam bersama Kader PKK di Balai Desa Sitisari merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan dan interaksi sosial dengan masyarakat, khususnya kelompok perempuan di tingkat desa. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dan menjadi sarana yang efektif bagi praktikan untuk berpartisipasi langsung dalam aktivitas kemasyarakatan yang bersifat nonformal.

Melalui kegiatan senam bersama, praktikan tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga memanfaatkan momen tersebut untuk menjalin komunikasi, memperkuat relasi, serta memahami dinamika sosial dan peran Kader PKK dalam mendukung berbagai program desa. Selain memberikan manfaat dalam menjaga kebugaran jasmani, kegiatan ini turut menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara praktikan dan masyarakat Desa Sitisari.



Foto 5. 3. Senam di Balai Desa

4. Input Data Kader PKK

Keterlibatan praktikan dalam membantu kader PKK melakukan input data laporan PKK di Balai Desa merupakan bentuk partisipasi aktif dalam mendukung administrasi dan pelaksanaan program kelembagaan desa. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya membantu kader PKK dalam menata dan mendokumentasikan data kegiatan secara sistematis dan tertib sesuai dengan kebutuhan pelaporan. Melalui kegiatan tersebut, praktikan berperan dalam proses penginputan data, pengelompokan informasi, serta pengecekan kelengkapan laporan yang berkaitan dengan program dan kegiatan PKK. Selain memberikan manfaat langsung dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan administrasi, kegiatan ini juga memberikan pengalaman bagi praktikan dalam memahami mekanisme kerja organisasi kemasyarakatan di tingkat desa, khususnya terkait tata kelola administrasi dan pelaporan kegiatan.



Foto 5. 4. Membantu Data Kader PKK

5. Program Keluarga Berencana (KB)

Keterlibatan praktikan dalam membantu pegawai BKKBN pada pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Desa Sitisari merupakan bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga yang berkualitas. Dalam kegiatan ini, praktikan berperan mendampingi pegawai BKKBN dalam pelaksanaan program yang ditujukan kepada masyarakat Desa Sitisari.

Praktikan turut berperan sebagai fasilitator yang mendukung terjadinya komunikasi dua arah antara petugas dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai program Keluarga Berencana, termasuk tujuan, manfaat, serta berbagai metode yang tersedia. Melalui keterlibatan tersebut, praktikan memperoleh pengalaman berharga dalam mendukung kegiatan pelayanan sosial dan

kesehatan reproduksi, sekaligus memahami pentingnya pendekatan partisipatif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana (KB).



Foto 5. 5.Program Keluarga Berencana

6. Pelantikan Perangkat Desa

Keterlibatan praktikan dalam menghadiri kegiatan pelantikan perangkat desa, yaitu Bendahara Desa dan Kepala Dusun II, merupakan bagian dari partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan desa serta upaya memahami struktur dan dinamika kelembagaan di tingkat desa. Kehadiran praktikan pada kegiatan tersebut memberikan kesempatan untuk menyaksikan secara langsung proses formal pengangkatan aparatur desa yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan pelantikan tersebut, praktikan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa secara efektif dan akuntabel, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, tata administrasi pemerintahan, serta mekanisme koordinasi pada tingkat wilayah dusun. Keterlibatan praktikan dalam kegiatan ini juga memberikan gambaran nyata mengenai struktur kelembagaan desa, pengambilan keputusan, serta peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.



Foto 5. 6.Pelantikan Perangkat Desa

5.4 Tantangan Praktikum Komunitas

Berikut tantangan yang dialami oleh Praktikan saat melakukan Praktik Praktikum Komunitas:

1. Praktikan dihadapkan pada beragam kepentingan dan pandangan antarindividu maupun kelompok di dalam komunitas, yang menuntut kemampuan mediasi dan pengelolaan dinamika sosial secara bijaksana.
2. Sulit menyesuaikan jadwal bertemu dengan kelompok sasaran dan *interest group* karena kesibukan bekerja dan sekolah, sehingga mengharuskan praktikan menyesuaikan jadwal dengan masyarakat.
3. Akses desa jauh dari kota menjadi tantangan bagi praktikan dalam mengakses sumber yang dapat dimanfaatkan pada proses intervensi.
4. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi waktu, sarana, maupun dukungan teknis, menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat secara optimal.

BAB VI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Simpulan

Berdasarkan rangkaian kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan di Desa Sitasari dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Desa Sitasari memiliki potensi sosial yang cukup kuat, ditunjukkan oleh adanya partisipasi aktif masyarakat serta peran kelembagaan desa seperti PKK, kelompok remaja, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
2. Modal sosial berupa kebersamaan, gotong royong, dan dukungan perangkat desa menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
3. Terdapat kebutuhan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial dan kesehatan, khususnya terkait pencegahan penyalahgunaan NAPZA, penguatan ketahanan keluarga, dan perilaku hidup sehat.
4. Penerapan metode *community work* dan *group work* secara terpadu terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat serta memperkuat kapasitas kelompok sasaran.
5. Dukungan dan kolaborasi antara masyarakat, perangkat desa, serta *stakeholder* terkait berperan penting dalam kelancaran dan keberhasilan kegiatan praktikum komunitas.
6. Dinamika sosial dan keberagaman kepentingan di masyarakat menuntut pendekatan yang partisipatif, adaptif, dan sensitif terhadap nilai serta budaya lokal.
7. Praktikum Komunitas di Desa Sitasari memberikan pengalaman empiris bagi praktikan dalam memahami realitas sosial serta praktik pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan dalam pemberdayaan sosial di Desa Sitasari yaitu:

1. Kegiatan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA perlu dilakukan secara rutin dan terstruktur, khususnya menasar kelompok remaja dan keluarga, dengan melibatkan sekolah, tokoh masyarakat, serta instansi terkait seperti BNN atau puskesmas.

2. Satgas Anti NAPZA perlu mendapatkan pelatihan lanjutan terkait deteksi dini, teknik komunikasi efektif, dan mekanisme rujukan, sehingga mampu optimal dalam pencegahan dan penanganan awal kasus penyalahgunaan NAPZA.
3. Kelompok PKK, karang taruna, dan tokoh agama diharapkan dapat dilibatkan secara aktif sebagai agen pencegahan NAPZA melalui kegiatan pembinaan, kampanye sosial, dan penguatan ketahanan keluarga berbasis masyarakat.
4. Desa diharapkan dapat mengembangkan kegiatan alternatif yang positif dan produktif bagi remaja, seperti kegiatan olahraga, seni, dan keterampilan, sebagai upaya preventif untuk mengurangi risiko keterlibatan dalam penyalahgunaan NAPZA.
5. Penguatan jejaring dan kemitraan lintas sektor, baik dengan pemerintah, swasta, maupun lembaga internasional, untuk mendukung pendanaan, inovasi program, serta perluasan akses layanan.
6. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan NAPZA perlu disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala guna menilai efektivitas program serta menjadi dasar perbaikan dan pengembangan kegiatan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashman, K. K. (2015). *Introduction to social work and social welfare: Critical thinking perspectives* (5th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Pengertian narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA)*. BNN RI.
- Connell, W. F. (1972). *Community: Its structure and functions*. New York, NY: Harper & Row.
- Eko, S. (2004). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep, kebijakan, dan implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fardia, A., & Yudi, R. (2010). *Penyalahgunaan NAPZA dan dampaknya terhadap kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Handyaningrat, S. (1980). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Haji Masagung
- Hawari, D. (2006). *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAPZA*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ife, J. (1997). *Community development: Creating community alternatives—Vision, analysis, and practice*. Melbourne: Longman.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Netting, F. E., Kettner, P. M., McMurtry, S. L., & Thomas, M. L. (2017). *Social work macro practice* (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Partodiharjo, S. (2008). *Kenali narkoba dan bahayanya*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1997). *Community development: Creating community alternatives-Vision, analysis, and practice*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Sheafor, B. W., & Horejsi, C. R. (2008). *Techniques and guidelines for social work practice* (8th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Santosa, S. (2004). *Dinamika kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarwoto. (1991). *Dasar-dasar organisasi dan manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumiati. (2009). *Penyalahgunaan NAPZA dan penanggulangannya*. Jakarta: EGC.
- World Health Organization. (2022). *Substance abuse and dependence*. World Health Organization.
- Zastrow, C. (2017). *Introduction to social work and social welfare: Empowering people* (12th ed.). Cengage Learning.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat: Wacana dan praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Kabupaten Kuningan.

Kardeti, Denti, dkk. 2025. *Pedoman Praktikum Komunitas*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Program Sarjana Terapan Program Studi Pekerjaan Sosial

LAMPIRAN

**Rencana Belajar Praktikum Komunitas
Kelompok 2 Desa Sitisari**

No.	Kegiatan	Waktu																																	
		Oktober																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Tahap Dialog																																			
1.	Penerimaan																																		
2.	Silaturahmi Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																																		
3.	<i>Community Involvement</i>																																		
4.	Memperkenalkan Diri																																		
5.	Menjelaskan Tahapan dan Kegiatan Praktikum Komunitas																																		
6.	Mensosialisasikan PPKS dan PSKS																																		

Keterangan Warna: ■ Hijau: Hari Pelaksanaan ■ Merah Muda: Hari Minggu ■ Merah: Hari Libur Nasional

Lampiran 1. Rencana Belajar Praktikum Komunitas

No. Kegiatan		Waktu																														
		November																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Tahap Discovery																																
1.	Asesmen Komunitas																															
2.	Perencanaan Komunitas																															
3.	Lokakarya/Community Meeting 1																															
Tahap Development																																
1.	Intevensi																															
2.	Lokakarya/Community Meeting 2																															
3.	Evaluasi																															

Keterangan Warna: ■ Hijau: Hari Pelaksanaan ■ Merah Muda: Hari Minggu ■ Merah: Hari Libur Nasional

No.	Kegiatan	Waktu															
		Desember															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.	Terminasi																
5.	Rujukan																
6.	Pengabdian Masyarakat																
7.	Penjemputan																

Keterangan Warna: ■ Hijau: Hari Pelaksanaan ■ Merah Muda: Hari Minggu ■ Merah: Hari Libur Nasional

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Minggu Ke: 1 (Satu)

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triamanda Santi Aulia Putri	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		
3	2204138	Ditami Mega Prilani	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		
5	2204107	Edward Manulang	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		
7	2204057	M Hari Nugraha	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		
8	2204072	Gafrena Istyawanda	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		
9	2204148	Onhisya Maharani	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma	Ma		

Mengetahui,

Pembimbing Utama,



Drs. Ramli, M.Pd
NIP. 196110161988101001

Pembimbing Pendamping,



Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan,



Edison, S.Pd
NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok,



M Hari Nugraha
NRP.2204057

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Minggu Ke: 2 (Kedua)

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
3	2204138	Ditami Mega Prilani	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
5	2204107	Edward Manulang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
7	2204057	M Hari Nugraha	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
8	2204072	Gafrena Istyawanda	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
9	2204148	Onhisya Maharani	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Mengetahui,

Pembimbing Utama, *[Signature]*
 Drs. Ramli, M.Pd
 NIP. 19611016198810 1 001

Pembimbing Pendamping, *[Signature]*
 Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
 NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan, *[Signature]*
 Edison, S.Pd
 NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok, *[Signature]*
 M Hari Nugraha
 NRP.2204057

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Minggu Ke: 3 (Ketiga)

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triandanda Santi Aulia Putri	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	
3	2204138	Ditami Mega Prilani	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	
5	2204107	Edward Manulang	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	
7	2204057	M Hari Nugraha	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	
8	2204072	Gafrena Istyawanda	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	
9	2204148	Onhisya Maharani	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	<i>Ha</i>	

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

[Signature]
Drs. Ramli, M.Pd
NIP. 19611016198810 1 001

Pembimbing Pendamping,

[Signature]
Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos
NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan,

[Signature]
Edison, S.Pd
NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok,

[Signature]
M Hari Nugraha
NRP:2204057

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

Minggu Ke: 4 (Empat)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri								
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini								
3	2204138	Ditami Mega Prilani								
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia								
5	2204107	Edward Manulang								
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah								
7	2204057	M Hari Nugraha								
8	2204072	Gafrena Istyawanda								
9	2204148	Onhisya Maharani								
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama								

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Drs. Ramli, M.Pd

NIP. 19611016198810 1 001

Pembimbing Pendamping,

Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos

NIP. 198608042018022001

Pendamping Lapangan,

Edison, S.Pd

NIPD. 0817 19820904 2020 1 01

Ketua Kelompok,

M Hari Nugraha

NRP.2204057





**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Minggu Ke: 5 (Lima)

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
3	2204138	Ditami Mega Prilani	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
4	2204178	Khimanty Dwi Anggia	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
5	2204107	Edward Manulang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
7	2204057	M Hari Nugraha	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
8	2204072	Gafrena Istiyawanda	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
9	2204148	Onhisya Maharani	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Mengetahui,

Pembimbing Utama,  Drs. Ramli, M.Pd NIP. 19611016198810 1 001	Pembimbing Pendamping,  Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos NIP. 198608042018022001	Pendamping Lapangan,  Edison, S.Pd NIPD. 0817 19820904 2020 1 01
Ketua Kelompok,  M Hari Nugraha NRP.2204057		

Lampiran 6. Daftar Hadir Minggu ke-5

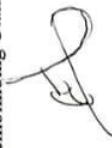


**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Minggu Ke: 6 (ke-6)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Trianda Santi Aulia Putri	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
3	2204138	Ditami Mega Prilani	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
5	2204107	Edward Manulang	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
7	2204057	M Hari Nugraha	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
8	2204072	Gafrena Istyawanda	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
9	2204148	Onhisya Maharani	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Lokasi Praktikum: Kecamatan Darma Desa Situsari

Mengetahui,

Pembimbing Utama,  Drs. Ramli, M.Pd NIP. 196110161988101001	Pembimbing Pendamping, Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos NIP. 198608042018022001	Pendamping Lapangan,  Edison, S.Pd NIPD. 0817 19820904 2020 1 01
Ketua Kelompok,  M Hari Nugraha NRP.2204057		

**LEMBAR PRESENSI MAHASISWA PRAKTIKUM KOMUNITAS
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025**

Minggu Ke: 7 (Tujuh)

NO	NRP	NAMA	Kehadiran							Keterangan
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	
1	2204005	Triananda Santi Aulia Putri								
2	2204127	Hanaa Alifah Isnaini								
3	2204138	Ditami Mega Prilani								
4	2204178	Khinanty Dwi Anggia								
5	2204107	Edward Manulang								
6	2204079	Fadhil Muhammad Anugrah								
7	2204057	M Hari Nugraha								
8	2204072	Gafrena Istyawanda								
9	2204148	Onhisya Maharani								
10	2204056	Muhammad Bintang Pratama								

Mengetahui,

Pembimbing Utama, Drs. Ramlia, M.Pd NIP. 19611016198810 1 001	Pembimbing Pendamping, Dyah Asri Gita Pratiwi, M.Kesos NIP. 198608042018022001	Pendamping Lapangan, Edison, S.Pd NIPD. 0817 19820904 2020 1 01
Ketua Kelompok, M Hari Nugraha NRP.2204057		



POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135
Fax.: (022) 250 4838, 2501330 Email: hamap@poltekesos.ac.id



BERITA ACARA PELAKSANAAN LOKAKARYA

Pada hari Senin, 17 November 2025 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan Lokakarya/*Community Meeting* tahap I pada kegiatan Praktikum Komunitas Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bertempat di Balai Desa Sitisari Kabupaten Kuningan.

Jumlah peserta yang hadir ...³⁰..... Orang

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala Desa Sitisari

Endin

Ketua Kelompok

M. Hari Nugraha

NRP. 2204057



POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
PROGRAM STUDI PEKERJAAN SOSIAL
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367 Bandung 40135
Fax.: (022) 250 4838, 2501330 Email: humas@poltekesos.ac.id



BERITA ACARA PELAKSANAAN LOKAKARYA

Pada hari Jumat, 28 November 2025 pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan Lokakarya/*Community Meeting* tahap II pada kegiatan Praktikum Komunitas Program Studi Pekerjaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, bertempat di Balai Desa Situsari Kabupaten Kuningan.

Jumlah peserta yang hadir¹⁰..... Orang

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kepala Desa Situsari

Endin

Ketua Kelompok

M. Hari Nugraha

NRP. 2204057



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SITUSARI
NOMOR : 34/KEPDesTAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYULUHAN PENANGGULANGAN
PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN (NAPZA) DI DESA SITUSARI KECAMATAN
DARMA KABUPATEN KUNINGAN.**

KEPALA DESA SITUSARI

- Menimbang** : a. pencegahan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat guna membantu upaya dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Desa Situsari perlu dibentuk Satgas Pencegahan penyalahgunaan NAPZA Desa Situsari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Situsari tentang dibentuk Satgas Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA Desa Situsari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang standar rehabilitasi sosial;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor WER.11/MEM/VI/2005 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat kerja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya;

**KEPALA DESA SITUSARI
MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SITUSARI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYULUHAN PENANGGULANGAN PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN (NAPZA) DI DESA SITUSARI KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN.**
- KESATU** : Pembentukan SATGAS Penyuluhan Penyalahgunaan Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA untuk Desa Sitisari Kecamatan Darma Kabupaten/Kota Kuningan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : SATGAS Penyuluhan Penanggulangan Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA di Desa Sitisari sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Penanggulangan, Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA.
 - b. Membuat spanduk/baliho/banner bertemakan anti NAPZA di lingkungan Desa Sitisari.
 - c. Mengevaluasi kegiatan SATGAS Penyuluhan Penanggulangan Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA dan selanjutnya melapor kepada Kepala Desa Sitisari.
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal pelaksanaan rencana aksi.
- KETIGA** : Masa tugas SATGAS Penyuluhan Penanggulangan Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, adalah sampai dengan Tahun 2029
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Sitisari
Pada tanggal 28 Desember 2025
KEPALA DESA SITUSARI



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

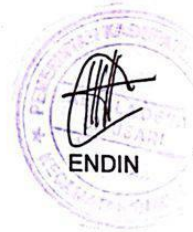
1. Camat Darma
2. Kapolsek Darma
3. Ketua Karang Taruna Desa Situsari
4. Ketua PKK Desa Situsari
5. Ketua RT
6. Linmas

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SITUSARI
KECAMATAN DARMA
KABUPATEN/KOTA KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 34/KEPDes TAHUN 2025
TANGGAL : 28 November 2025

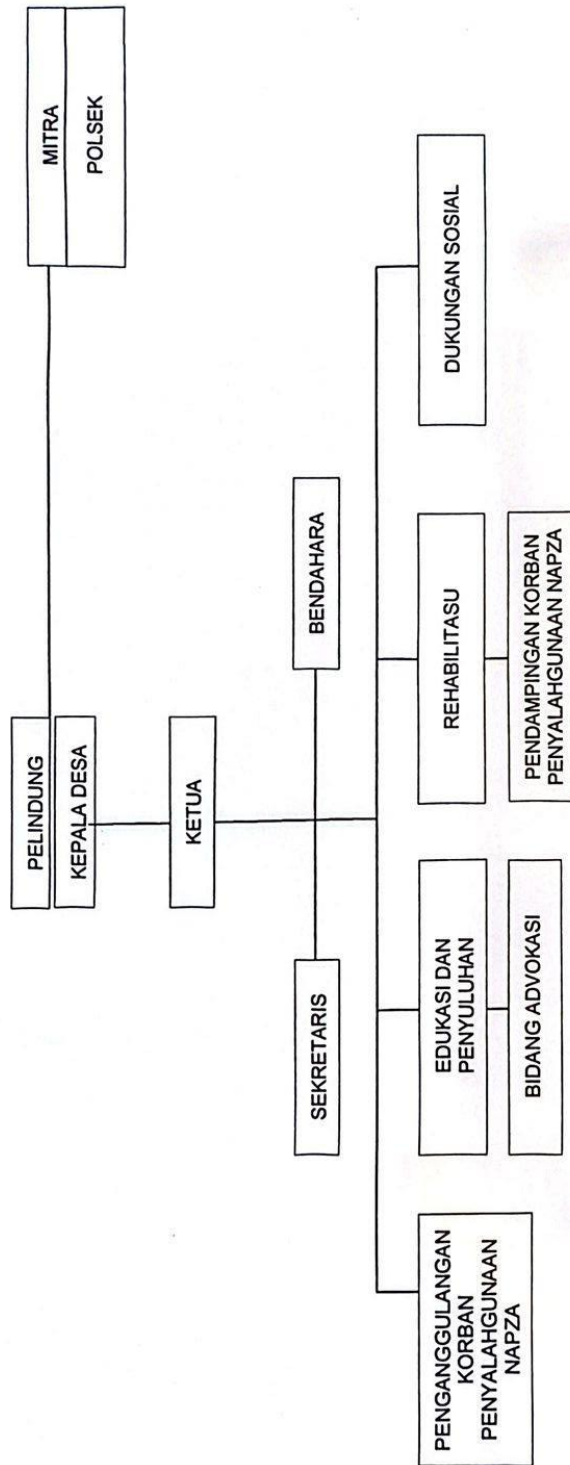
TENTANG
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYULUHAN PENANGGULANGAN PENCEGAHAN DAN
PENYALAHGUNAAN (NAPZA) DI DESA SITUSARI KECAMATAN DARMA KABUPATEN
KUNINGAN.

NO	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT
1.	Endin	L	Penanggungjawab	Situsari
2.	Lukman	L	Ketua	Situsari
3.	Rudi	L	Sekretaris	Situsari
4.	Antini Arvianita	P	Anggota	Situsari
5.	Bunga	P	Anggota	Situsari
6.	Saroh	P	Anggota	Situsari
7.	Rindi	P	Anggota	Situsari
8.	Putri	P	Anggota	Situsari

KEPALA DESA SITUSARI



Struktur SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYULUHAN PENANGGULANGAN Pencegahan dan Penyalahgunaan (NAPZA) di Desa Situsari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.





**FORM EVALUASI KEGIATAN INTERVENSI PENYULUHAN DAN
PEMBERDAYAAN SATGAS ANTI NAPZA DI DESA SITUSARI**

A. Identitas

Nama : Rudi

Tanggal : 29 November 2025

B. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda (✓) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman anda selama mengikuti kegiatan. jawaban anda sangat membantu untuk meningkatkan kualitas program.

Skala Keterangan	
SS	Sangat Setuju
S	Setuju
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

C. Penilaian Kegiatan

No	Pernyataan	Penilaian			
		STS	TS	S	SS
1.	Kegiatan penyuluhan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA berjalan efektif dan melibatkan partisipasi peserta			✓	
2.	Tujuan dan manfaat program penyuluhan pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA disampaikan dengan jelas			✓	
3.	Materi penyuluhan dan strategi mudah dipahami dan memberikan pengetahuan baru			✓	
4.	Materi penyuluhan membantu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pencegahan dan penanganan penyalahgunaan NAPZA				✓

5.	Pembentukan satgas anti NAPZA dilakukan secara terbuka, praktis, dan partisipatif				✓
6.	Peserta berperan aktif selama kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan			✓	
7.	Kegiatan meningkatkan pengetahuan dan keberdayaan peserta dalam membentuk satgas anti NAPZA			✓	
8.	Satgas memahami manfaat dan fungsi pembentukan satgas anti NAPZA				✓
9.	Waktu kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan berlangsung efektif dan sesuai agenda				✓
10.	Suasana kegiatan kondusif, interaktif, dan nyaman				✓
14.	Kegiatan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar				✓
15.	Peserta bersedia menerapkan ilmu yang diperoleh dan mendukung kelanjutan program satgas anti NAPZA di desa situsari				✓

D. Penilaian Keseluruhan

Secara keseluruhan saya menilai kegiatan ini:

Sangat Memuaskan
 Memuaskan
 Cukup
 Kurang

E. Saran & Harapan

1. Saran untuk perbaikan kegiatan selanjutnya:

Waktu pelaksanaan praktikum ditambah agar lebih maksimal

2. Harapan terhadap keberlanjutan Program Satgas Anti NAPZA:

Harapannya Satgas anti Napza dapat menjadi wadah dalam mencegah dan menangani Napza